



LAPORAN KINERJA

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA
PENGAMBENGAN
TRIWULAN I TAHUN 2026

LEMBAR PENGESAHAN



LAPORAN KINERJA (LKj)

TAHUN 2026

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN

Disetujui oleh :

Penanggung Jawab,
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Pengambangan

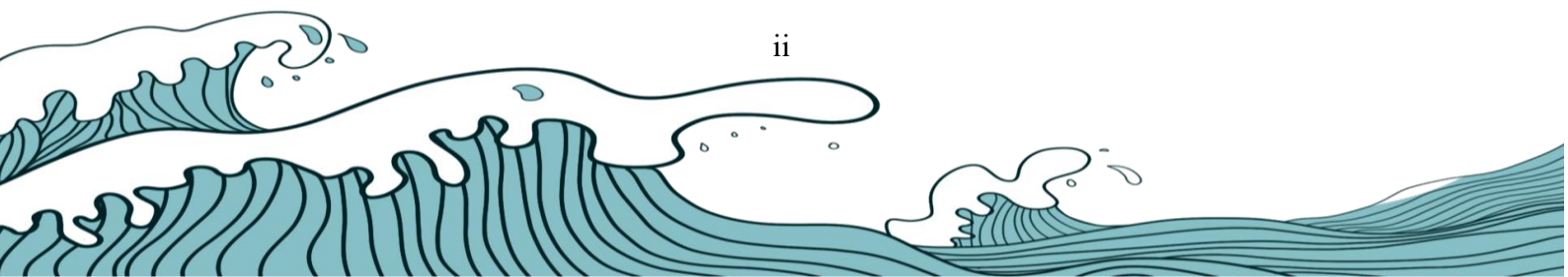
Kartono

Jembrana, 20 April 2026

Disusun oleh :

Ketua Tim
Kepala Sub Bagian Umum

Lukman Hadi



KATA PENGANTAR



Mengacu pada dan RKT Tahun 2026, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan senantiasa mengupayakan seluruh rencana aksi yang ada dilaksanakan secara optimal, efektif dan efisien, sebagaimana mestinya dengan harapan target indikator kinerja yang terdapat pada RPJMN dan RKT dapat tercapai dengan maksimal dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2026 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi Ditjen Perikanan Tangkap kepada publik dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian pada Tahun 2026 merupakan pencapaian yang dijadikan dasar (*base line*) untuk menetapkan target pada tahun – tahun berikutnya yang kemungkinan besar akan berdampak pada review beberapa dokumen perencanaan Tahun 2027. Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2026 ini disertai dengan Data Dukung Capaian sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dalam pelaporan kinerja ini.

Kami berharap apa yang disajikan dalam Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2026 ini dapat menjadi masukan kepada seluruh pihak terkait dalam memahami proses pelaksanaan tugas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan pada Tahun 2026.

Jembrana, 20 April 2026

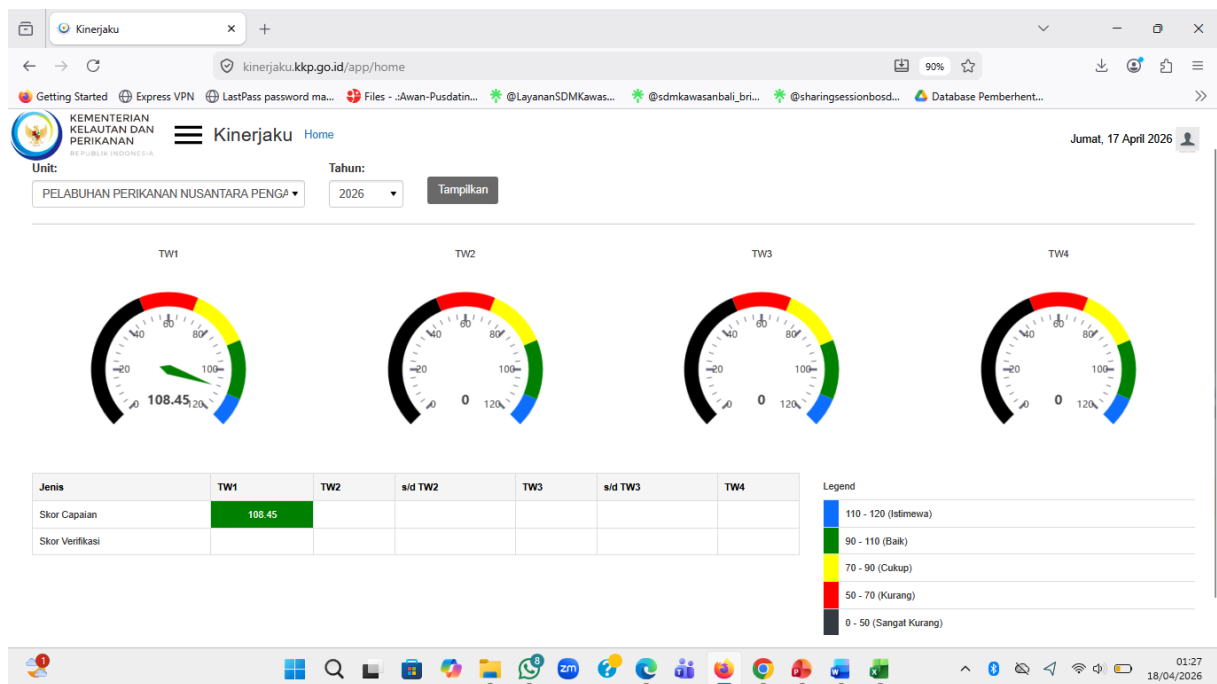
Kepala Pelabuhan



Kartono, A.Pi, M.P

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Triwulan I Tahun 2026 menyajikan capaian strategis organisasi yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan target sebesar Rp **288.330.856.000,-** pada Tahun 2026, yang terealisasi sebesar Rp 1.899.841.983,- atau 0,65 % dari total target penyerapan anggaran pada Tahun 2026. Sedangkan secara kinerja dengan hasil capaian sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dan dapat memenuhi target dengan Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambahkan dengan Nilai Indikator Kinerja (IK) sebesar **108,45%**. (Sesuai dashboard pada Aplikasi Kinerjaku pada Gambar 1)



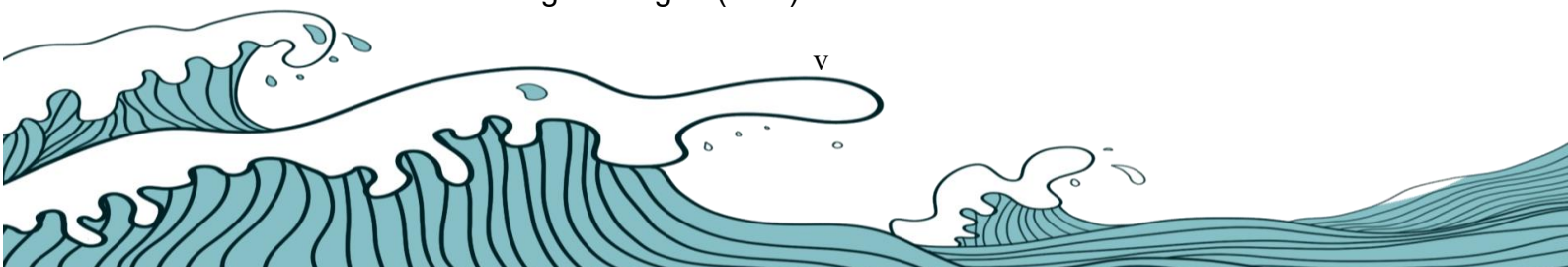
Gambar 1. Dashboard pada aplikasi Kinerjaku Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2026

Dari hasil pengukuran kinerja Ditjen Perikanan Tangkap dan UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan s/d Triwulan I Tahun 2026 melalui pencapaian target indikator kinerja yang di input ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, diperoleh hasil indikator yang memenuhi target yaitu sebagai berikut :

1. IKS.1 Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Pengembangan (Rp Juta)
2. IKS.02.1 Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan (Ton)
3. IKS.03.2 Tingkat Kinerja PPN Pengembangan (Nilai)
4. IKS.03.5 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
5. IKS.04.1 Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)
6. IKS.05.2 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
7. IKS.05.5 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
8. IKS.05.9 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)

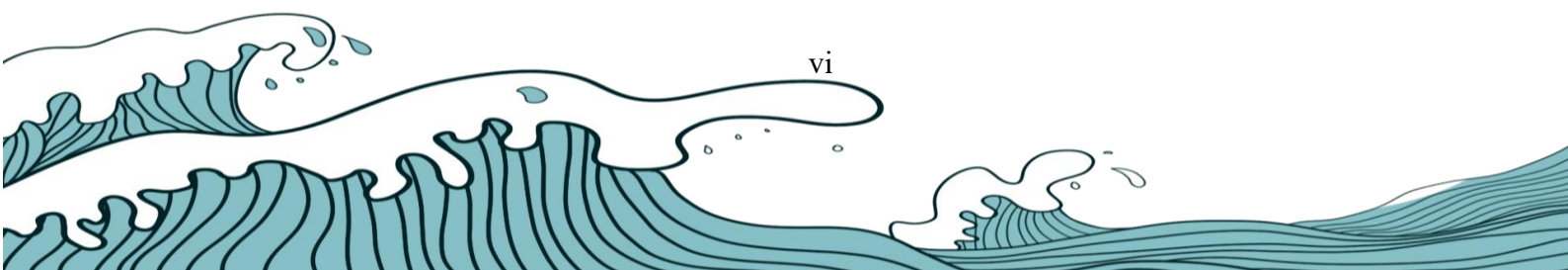
Sedangkan untuk indikator yang belum dilakukan pengukuran pada triwulan I Tahun 2026, antara lain:

1. IKS.03.1 Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan (Persen)
2. IKS.03.3 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
3. IKS.03.4 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
4. IKS.04.2 Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)
5. IKS.05.1 Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
6. IKS.05.3 Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)



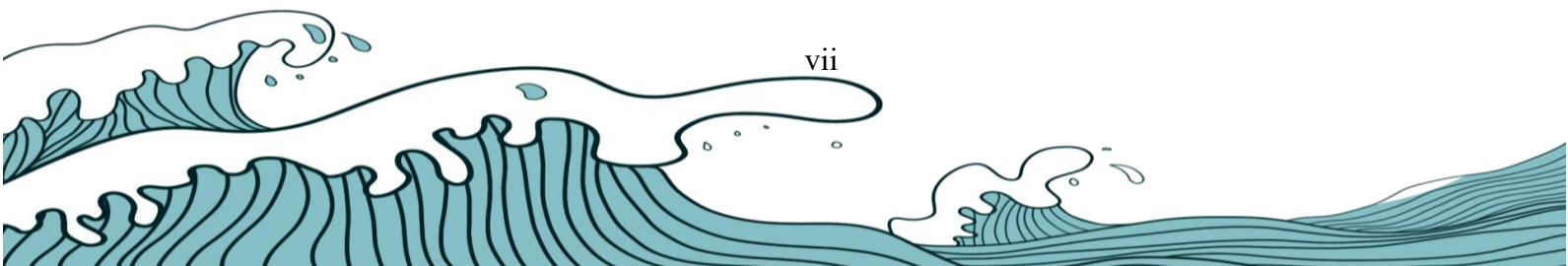
7. IKS.05.4 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)
8. IKS.05.6 Persentase Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
9. IKS.05.7 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
10. IKS.05.8 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)

Pengukuran kinerja berbasis BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian *output*) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian *outcome*). Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi.



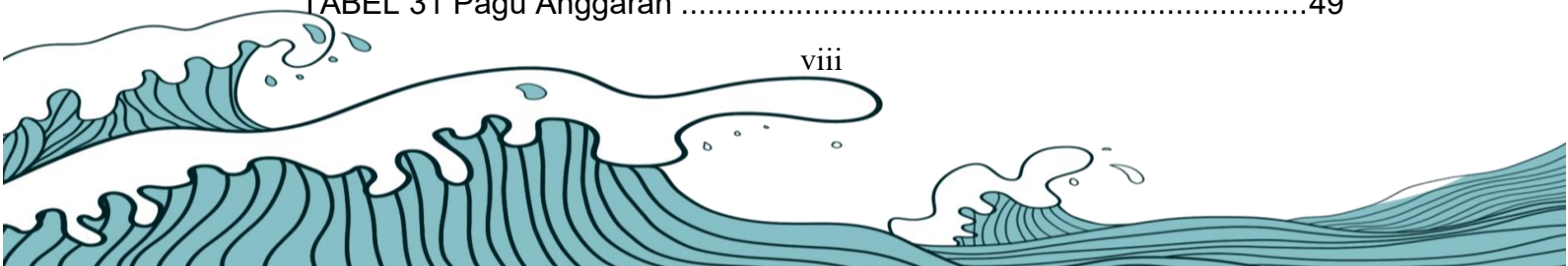
DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum	2
C. Tugas dan Fungsi	3
D. Struktur Organisasi	4
E. SDM Aparatur PPN Pengembangan	6
F. Sistematika Penyajian	9
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	11
A. Pembangunan Perikanan Tangkap	11
B. Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2026	17
C. Rencana Aksi Penetapan Kinerja	19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
B. Akuntabilitas Keuangan	48
BAB IV. PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Tindak Lanjut Periode Sebelumnya	53
C. Rekomendasi Tindak Lanjut	54



DAFTAR TABEL

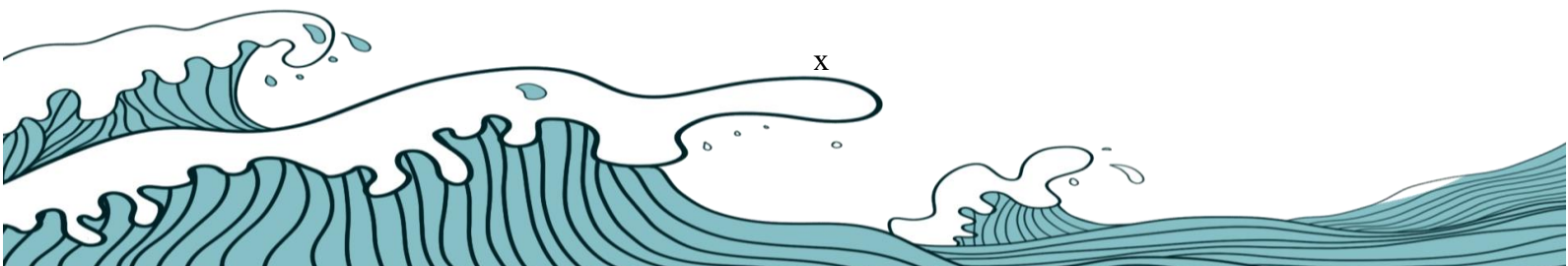
TABEL 1 Komposisi Pegawai Pelabuhan Berdasarkan Pendidikan	7
TABEL 2 Komposisi Pegawai Pelabuhan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	8
TABEL 3 Tabel Informasi Cascading	16
TABEL 4 Target Kinerja Pelabuhan.....	18
TABEL 5 Komposisi Target dan Realisasi Pagu Anggaran	19
TABEL 6 Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026.....	21
TABEL 7 Rincian Capaian Indikator PNPB	24
TABEL 8 Perbandingan dengan Satker Lain	25
TABEL 9 Realisasi anggaran mendukung IKU	27
TABEL 10 Rincian Capaian Indikator Volume Produksi	28
TABEL 11 Perbandingan dengan Satker Lain	29
TABEL 12 Realisasi anggaran mendukung IKU	30
TABEL 13 Rincian Capaian Indikator Tingkat Kinerja.....	31
TABEL 14 Perbandingan dengan Satker Lain	32
TABEL 15 Realisasi anggaran mendukung IKU	33
TABEL 16 Rincian Capaian Indikator Nilai Pengendalian Lingkungan	34
TABEL 17 Perbandingan dengan Satker Lain	35
TABEL 18 Realisasi anggaran mendukung IKU	36
TABEL 19 Rincian Capaian Indikator Kapal Perikanan Izin Daerah	37
TABEL 20 Perbandingan dengan Satker Lain	38
TABEL 21 Realisasi anggaran mendukung IKU	39
TABEL 22 Rincian Capaian Indikator Rekomendasi Hasil Pengawasan ..	40
TABEL 23 Perbandingan dengan Satker Lain	41
TABEL 24 Realisasi anggaran mendukung IKU	42
TABEL 25 Rincian Capaian Indikator Rencana Umum Pengadaan PBJ ..	42
TABEL 26 Perbandingan dengan Satker Lain	44
TABEL 27 Realisasi anggaran mendukung IKU	45
TABEL 28 Rincian Capaian Indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	46
TABEL 29 Perbandingan dengan Satker Lain	47
TABEL 30 Realisasi anggaran mendukung IKU	48
TABEL 31 Pagu Anggaran	49



TABEL 33 Realisasi Keuangan.....	50
----------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 Dashboard Pada Aplikasi Kinerjaku	iv
GAMBAR 2 Struktur Organisasi Pelabuhan	6
GAMBAR 3 Dashboard Pada Aplikasi Kinerjaku	51



BAB I PENDAHULUAN

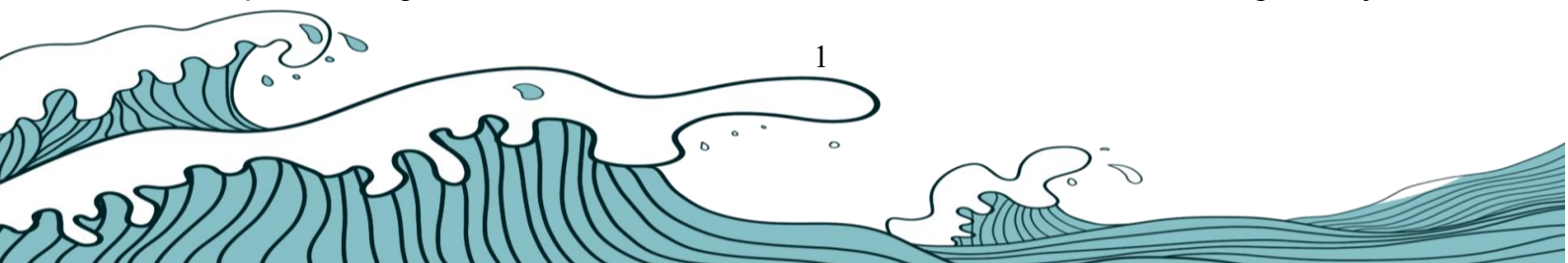
A. Latar Belakang

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai tujuan pembangunan perikanan tangkap yakni meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan nelayan. Enam kegiatan utama yang dilakukan yakni (1) pengelolaan sumberdaya ikan, (2) pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkap ikan dan pengawakan kapal perikanan, (3) pembangunan, pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan, (4) pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan kecil, (5) pelayanan usaha perikanan tangkap yang efisien, tertib dan berkelanjutan, dan (6) peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis.

Pelabuhan Perikanan merupakan tempat yang sangat strategis dan berperan sebagai rumah atau basis utama dalam melaksanakan berbagai program kerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap maupun tempat untuk mengimplementasikan peraturan perundangan yang berlaku pada lingkup KKP yang didasari 3 pilar Misi **KKP yaitu Kedaulatan (*Sovereignty*), Keberlanjutan (*Sustainability*) dan Kesejahteraan (*Prosperity*)**. Oleh karena itu, di dalam kawasan Pelabuhan harus tercipta suasana aman, nyaman dan kondusif agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan secara baik.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan bertanggung jawab (*good governance*) diperlukan pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

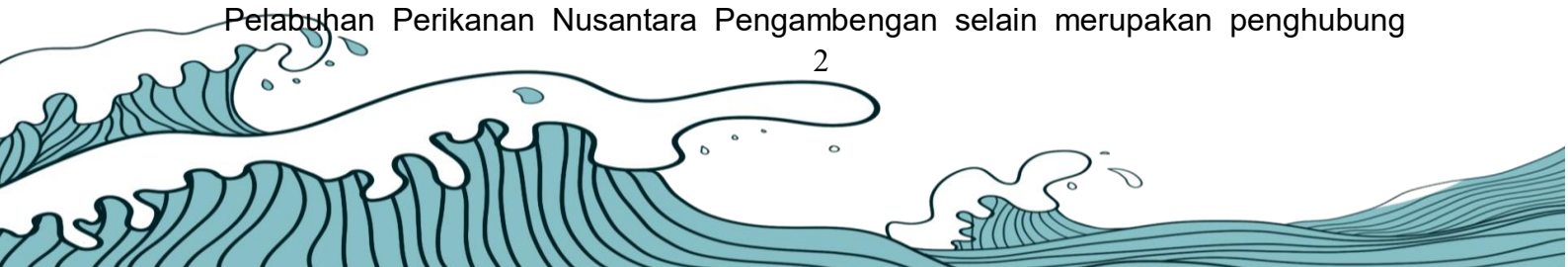


Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara *akuntable* sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi yang disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan di tahun mendatang.

Tujuan dari pelaporan kinerja ini yakni: (1) untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai serta (2) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Wujud pelaporan kinerja dimaksud adalah Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan yang disusun setiap tahun. Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan disusun oleh setiap unit kerja yang menyusun perjanjian kinerja yakni dengan menyajikan informasi tentang ; (1) uraian singkat tentang unit kerja, (2) rencana dan target kinerja yang ditetapkan oleh unit kerja dengan atasan unit kerja, (3) pengukuran kinerja, dan (4) evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program dan kegiatan serta kondisi terakhir yang seharusnya. Oleh karena itu, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan setiap tahunnya telah melakukan penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana format yang telah ditetapkan. Ukuran keberhasilan dilakukan melalui pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang dapat menggambarkan kinerja utama Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan.

B. Gambaran Umum

Pembangunan perikanan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat nelayan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Prasarana pelabuhan perikanan mempunyai andil yang cukup besar dalam menentukan keberhasilan pembangunan perikanan tangkap. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam usaha pengembangan usaha perikanan tangkap yaitu sebagai pusat atau sentral kegiatan perikanan terutama yang berada di wilayah Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan selain merupakan penghubung



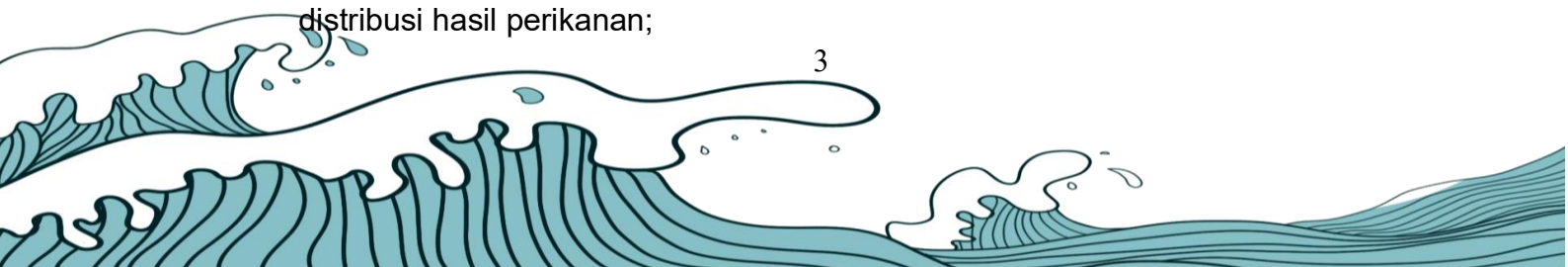
antara nelayan dengan pengguna hasil perikanan laut, baik pengguna langsung maupun tidak langsung seperti pedagang, pabrik pengolah dan lain-lain, juga merupakan tempat berinteraksinya berbagai kepentingan masyarakat pantai yang bertempat di sekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan. Selain itu Pelabuhan Perikanan juga merupakan titik temu (*terminal point*) yang menguntungkan antara kegiatan ekonomi di laut dengan kegiatan ekonomi darat.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pelabuhan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dalam hal ini dipimpin oleh seorang Kepala Pelabuhan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan menyelenggarakan fungsinya:

1. Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi pelabuhan perikanan;
2. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
3. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
4. Pelaksanaan pemeriksaan *Log Book*;
5. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
6. Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
7. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
8. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;
9. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;



10. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
11. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
12. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
13. Pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
14. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan

Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan tersebut pelabuhan perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- A. Fungsi pemerintahan yaitu fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan. Serta fungsi lainnya yang terkait dengan pengelolaan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi pemerintahan tersebut meliputi: Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan; Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan; Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan; Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan; Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan; Pelaksanaan kesyahbandaran; Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan; Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan; Tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan; Pemantauan wilayah pesisir; Pengendalian lingkungan; Kepabeanan; dan/atau keimigrasian.

- B. Fungsi pengusaha yaitu fungsi untuk melaksanakan pengusaha berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan yang meliputi: Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan; Pelayanan bongkar muat ikan; Pelayanan pengolahan hasil perikanan; Pemasaran dan distribusi ikan; Pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan; Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan; Pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan; Wisata bahari; dan/atau Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan fungsi tersebut, dengan memperhatikan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), maka pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab masing-masing

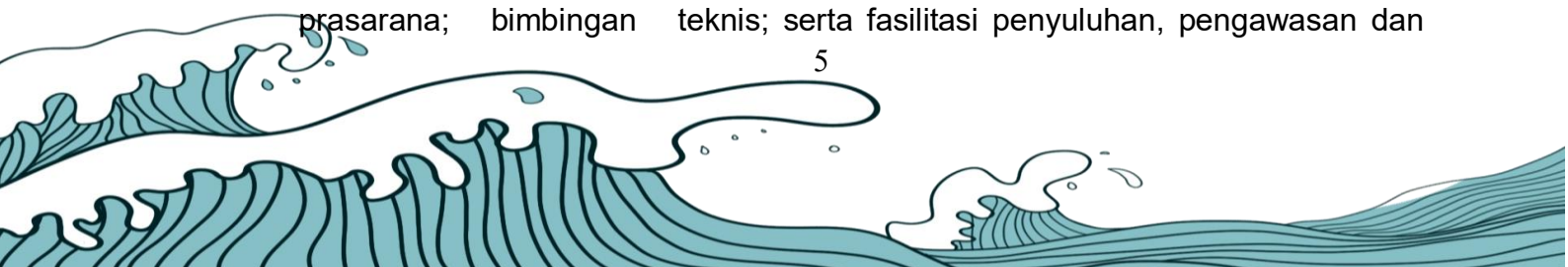


eselon-I lingkup KKP yang berkaitan dengan kebijakan di daerah secara implisit juga menjadi tugas dan fungsi pelabuhan perikanan.

D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengembangan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 66/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan merupakan Eselon III meliputi posisi jabatan sebagai berikut:

1. Tim Kerja Dukungan Manajerial yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan anggaran, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, keuangan dan umum, pelaksanaan pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan dan keselamatan kerja), rumah tangga dan Barang Milik Negara, pelayanan masyarakat perikanan, melakukan penyiapan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.
2. Tim Kerja Operasional Pelabuhan dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan yang memiliki tugas dan fungsinya yaitu melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan data, informasi, publikasi, inspeksi pembongkaran ikan, bimbingan teknis, dan penerbitan Sertifikat CPIB.
3. Tim Kerja Kesyahbandaran, dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran mempunyai tugas dan fungsinya melakukan pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan, pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor, pemeriksaan *Log Book*, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, pengawasan pengisian bahan bakar, bimbingan teknis serta kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha, yang dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha mempunyai tugas dan fungsinya yaitu melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pendayagunaan sarana dan prasarana; bimbingan teknis; serta fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan



pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan, melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan jasa seperti sewa alat berat, sewa lahan, jasa kebersihan, pas harian/berlangganan, penerbitan rekomendasi pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha, serta bimbingan teknis pelayanan usaha.

5. Kelompok Jabatan Fungsional, Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional kepelabuhanan serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan Fungsional pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan terdiri dari Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda, Pranata Komputer Muda, dan Pranata Keuangan APBN Penyelia.



Gambar 2. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan

E. SDM Aparatur PPN Pengembangan

Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja

pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan didukung oleh 79 orang pegawai yang terdiri dari PNS sebanyak 38 orang, PPPK sebanyak 38 orang dan Pegawai dari PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan) sebanyak 3 orang yang berasal dari berbagai bidang keahlian. Seluruh SDM di pelabuhan perikanan ini merupakan aset untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Komposisi Pegawai Pelabuhan Tahun 2026 Berdasarkan Pendidikan

No.	Jabatan	Pendidikan					Jumlah
		SMP	SMA	DIII	S1/DIV	S2	
1	Kepala Pelabuhan	-	-	-	-	1	1
2	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial	-	-	-	1	-	1
	Jabatan Fungsional Fertentu/Pelaksana Tim Kerja Dukungan Manajerial	-	3	2	8	-	13
3	Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	-	-	-	1	-	1
	Jabatan Fungsional Fertentu/Pelaksana Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	1	12	1	2	1	17

4	KetuaTim Kerja Operasional Pelabuhan	-	-	-	-	1	1
	Jabatan Fungsional Fertentu/Pelaksana Tim Kerja Operasional Pelabuhan	-	2	1	13	-	16
8	Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran	-	-	-	1	-	1
	Jabatan Fungsional Fertentu/Pelaksana Tim Kerja Kesyahbandaran	-	9	3	16	-	28
TOTAL							79

Tabel 2. Rekapitulasi Pegawai Pelabuhan Tahun 2026 Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kepala Pelabuhan	1	-	1
2	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial	1	-	1
	Jabatan Fungsional Fertentu/Pelaksana Tim Kerja Dukungan Manajerial	14	4	18
3	Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	1	-	1
	Jabatan Fungsional Fertentu/Pelaksana Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	3	9	12
4	KetuaTim Kerja Operasional Pelabuhan	1	-	1

	Jabatan Fungsional Fertentu/Pelaksana Tim Kerja Operasional Pelabuhan	7	9	16
8	Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran	1	-	1
	Jabatan Fungsional Fertentu/Pelaksana Tim Kerja Kesyahbandaran	21	7	28
TOTAL				79

F. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Triwulan I Tahun 2026 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

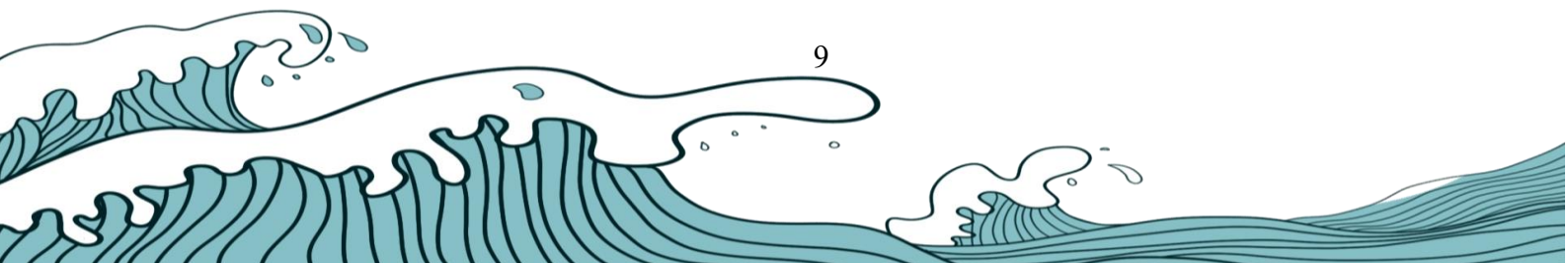
Laporan Kinerja ini bertujuan menginformasikan capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Triwulan I Tahun 2026. Capaian Kinerja (*Performance Results*) s/d Triwulan I Tahun 2026 tersebut dibandingkan dengan Target Tahunan Perjanjian Kinerja (*Performance Plan*) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2026 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun kaitan dari sistematika penyajian Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Pengembangan Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut:

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada Bab ini disajikan ringkasan secara menyeluruh Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan.

2. BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini di sajikan informasi umum tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi serta Sistematika Laporan.



3. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini, menguraikan secara singkat mengenai visi, misi dan ringkasan perjanjian kinerja Triwulan I Tahun 2026.

4. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

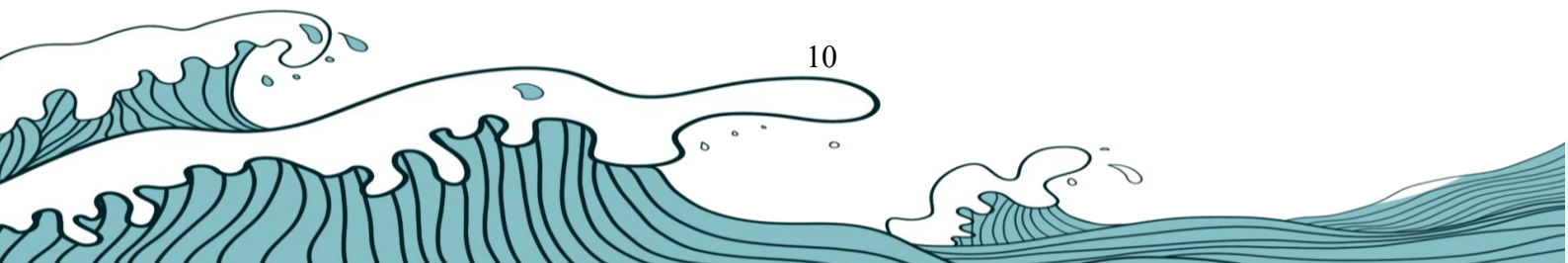
Pada Bab ini, menguraikan capaian kinerja organisasi (membandingkan antara target dan realisasi tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi, analisa penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan serta realisasi anggaran.

5. BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

6. LAMPIRAN

Isi dari lampiran merupakan kumpulan dari Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Pembangunan Perikanan Tangkap

- **Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**

Visi Ditjen Perikanan Tangkap adalah “Terwujudnya Tata Kelola Perikanan Tangkap yang Partisipatif, Berkelanjutan dan Menyejahterakan Nelayan” untuk mewujudkan “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

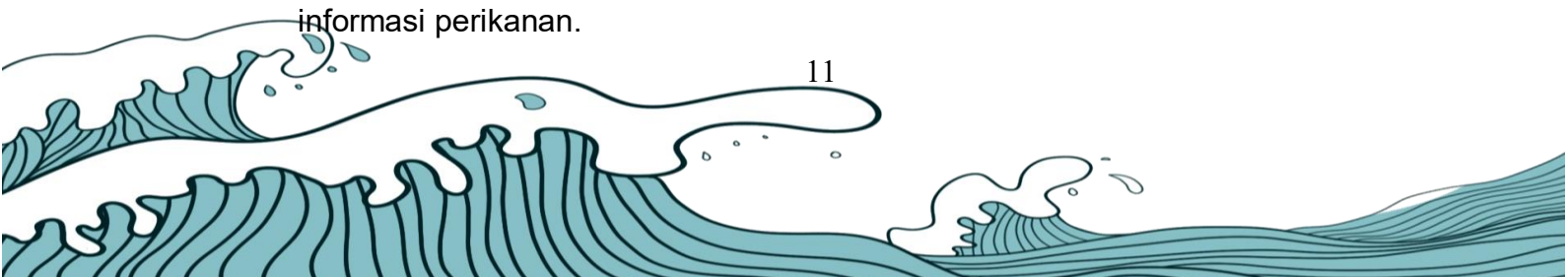
- **Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**

Ditjen Perikanan Tangkap melakukan Misi Asta Cita sbagai agenda prioritas nasional untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi 8%, penurunan tingkat kemiskinan 0%, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan dengan fokus pada misi Asta Cita ke-2: Swasembada pangan dan ekonomi biru.

- **Tujuan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan perikanan tangkap adalah :

1. Menjamin kelestarian sumber daya ikan melalui penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan pengawasan berbasis wilayah pengelolaan.
2. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha penangkapan ikan melalui pemanfaatan teknologi, modernisasi armada, dan integrasi sistem logistik hasil tangkapan.
3. Mengembangkan infrastuktur pelabuhan perikanan sebagai simpul layanan terpadu dan pusat pertumbuhan ekonomi kelautan.
4. Memperkuat kelembagaan, perlindungan dan pemberdayaan nelayan, termasuk nelayan kecil, perempuan dan pemuda untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing
5. Meningkatkan tata kelola perikanan tangkap yang trasnparan dan akuntabel, melalui penguatan regulasi, perizinan, pemantauan, serta sistem data dan informasi perikanan.



Berdasarkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap diturunkan ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebagai berikut:

1. Sebagai “Sentra Usaha Mina” artinya bahwa Wilayah PPN Pengembangan Jembrana merupakan sentral bagi kegiatan-kegiatan perikanan dari 5 (lima) TPI (Tempat Pendaratan Ikan) yang ada di Kota Jembrana sepanjang garis pantai 76 km, yang akhirnya akan menjadi Infrastruktur dari Industri Perikanan di masa mendatang.
2. “Yang Berdaya Saing” artinya Hasil Produksi/Tangkapan PPN Pengembangan mempunyai daya mutu yang berkualitas ekspor dikarenakan sangat menjaga nilai mutu sehingga Produk Perikanan yang dipasarkan stabil. Pada Tahun 2014 Indonesia sudah mencapai tingkat kesuksesan yang mencakup kawasan Pelabuhan tidak hanya sebagai Tempat Pendaratan Ikan, tetapi juga meliputi Penangkapan Ikan, Pelelangan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan. Di dalam Kawasan Pelabuhan Perikanan ke depannya diharapkan adanya industry/perusahaan yang bergerak dalam penyediaan sarana produksi perikanan yang berwawasan pengolahan sumberdaya ikan yang berkelanjutan di mana dalam pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan harus memperhatikan dampak akibat dari pemanfaatan yang berlebihan sehingga ikan tidak punah.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, diperlukan langkah – langkah sebagai berikut:

1. Dengan pelayanan prima diharapkan para masyarakat/nelayan/stakeholder menerima kemudahan segala kebutuhannya yang sesuai dengan pelayanan yang disediakan di PPN Pengembangan Jembrana
2. Pelabuhan sebagai kluster perikanan sekaligus pusat pertumbuhan industri perikanan terpadu hal ini dimaksudkan untuk memudahkan para nelayan-nelayan kecil membuka pasar ekonomi dimana akan terjadi transaksi secara menyeluruh dalam satu lokasi yaitu dialokasikan pada PPN Pengembangan Jembrana
3. Peningkatan produksi yang diikuti dengan peningkatan mutu, hal ini dimaksudkan dengan peningkatan yang tinggi harus diusahakan nilai produksi yang tinggi pula, contohnya dengan peningkatan mutu ikan yang dihasilkan harus, sehat, segar, dan bebas formalin. Maka di Pelabuhanlah yang akan menyediakan wadah untuk menguji sample ikan yang sudah bebas dari formalin. Setelah bebas dari formalin



maka ikan tersebut boleh dipasarkan.

4. Pelabuhan perikanan sebagai Pusat Informasi dan Data Statistik Perikanan, diharapkan kedepannya PPN Pengembangan Jembrana adalah wakil dari seluruh Tempat Pendaratan Ikan/Tempat Pelelangan Ikan yang semua itu adalah wadah penghasil jumlah data dan statistik volume ikan yang di tangkap perhari, per bulan maupun pertahunnya di Kota Jembrana
5. Menciptakan lingkungan pelabuhan perikanan yang bersih hygienis, adalah tolak ukur dari mutu ikan yang akan dipasarkan di daerah tangkapan oleh karena itu baik cara ataupun tindakan pemeliharaan fasilitas-fasilitas pelabuhan yang bersih sangat diperhatikan.
6. Pelabuhan perikanan sebagai fasilitator dalam pengembangan wisata bahari, hal ini dikembangkan sebagai wadah Pendidikan bagi Pelajar untuk mengenalkan Bahwa Laut adalah salah satu kekayaan Indonesia yang indah dan tidak akan pernah habis, oleh karena itu dengan wadah Wisata Bahari di harapkan membangkitkan para generasi muda untuk lebih mencintai laut baik Flora maupun Fauna Laut yang ada di Ekosistem laut
7. Meningkatkan *multiplier effect* bagi masyarakat Kota Jembrana melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja, diharapkan dengan Pemusatan Kegiatan di Sektor Perikanan maka diharapkan dapat menyerap tenaga kerja di kota Jembrana sendiri. Hal ini juga diharapkan dengan penambahan tenaga kerja yang bekerja di area PPN Pengembangan Jembrana maka akan mengurangi tingkat kejahatan dengan peningkatan taraf hidup seseorang dari menganggur menjadi pekerja.
8. Pelabuhan perikanan sebagai tempat pemantauan dan pengawasan (monitoring dan kontrol) sumber daya ikan, tahap akhir dari semua itu diharapkan Pelabuhan Perikanan adalah media untuk mengontrol dan memonitoring baik para Nelayan/Stakeholder yang ada di Kota Jembrana untuk menjaga dan mengontrol Kebutuhan Usahanya di Bidang Perikanan dalam hal Penangkapan Ikan yang Berlebih karena hal ini sudah termasuk merusak Ekosistem Laut sehingga Sumberdaya Ikan yang ada lambat laun akan habis dan tidak ada lagi, sehingga akan terjadi kepincangan/ ketidakseimbangan Ekosistem Darat dan laut.

Sasaran Strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan

Sasaran program pembangunan perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat



Jenderal Perikanan Tangkap adalah kondisi yang ingin dicapai oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan, antara lain:

1. *Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Pengembangan*

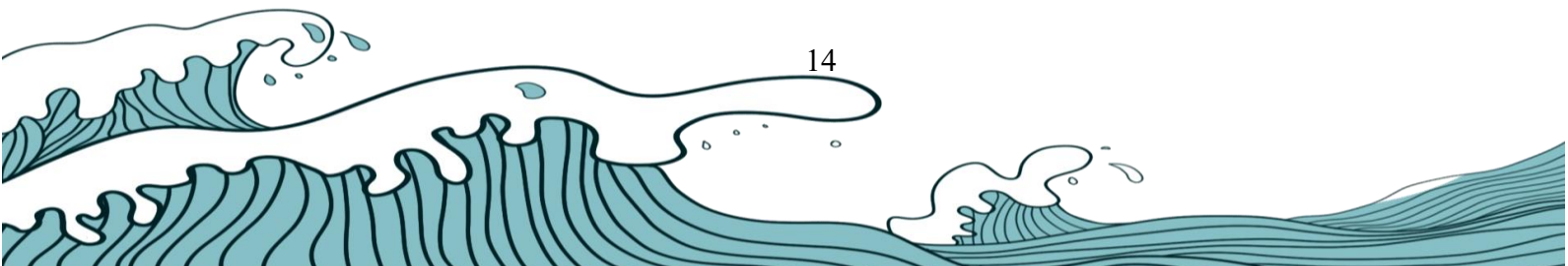
- a) Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Rp Juta)
- Jumlah pemenuhan pelaporan PNBP di UPT PPN Pengembangan (dokumen).

2. *Produktivitas Perikanan Tangkap di PPN Pengembangan*

- a) Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Pengembangan (Ton)
- Validasi nilai perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (dokumen)

3. *Pengelolaan PPN Pengembangan yang optimal dan bertanggung jawab*

- a) Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan (Persen)
- Jumlah permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan (dokumen)
- b) Tingkat Kinerja PPN Pengembangan (Nilai)
- Nilai Tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan berdasarkan data Evkin (Aplikasi)
- c) Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
- Jumlah pelayanan kesyahbandaran yang diterbitkan PPN Pengembangan (dokumen)
- d) Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
- Penjumlahan pengembangan fasilitas di PPN Pengembangan
- e) Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
- Nilai pengendalian lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan berdasarkan data Selaraskan (Aplikasi)

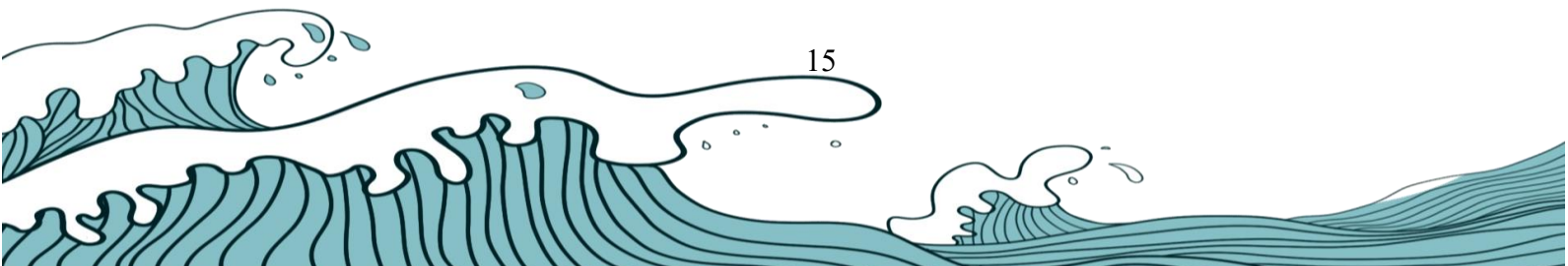


4. *Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di PPN Pengembangan*

- a) Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)
 - Jumlah dokumen kapal perikanan yang diterbitkan oleh PPN Pengembangan
- b) Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)
 - Pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan, Pendidikan dan Pelatihan, Ujian dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan

5. *Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan*

- a) Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
 - Nilai hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas yang mencakup 6 Area Pengungkit dan 2 Area Komponen Hasil serta mengacu kepada Juknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Data dukung berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE) hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Unit Kerja.
- b) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Pengembangan (Persen)
 - Nilai persentase atas penyelesaian laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK PPN Pengembangan
- c) Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
 - Aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP
 - Perencanaan kinerja 30%
 - Pengukuran kinerja 30%
 - Pelaporan kinerja 15%
 - Evaluasi kinerja
- d) IP ASN PPN Pengembangan (indeks)
 - IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan
- e) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)



- (Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP / Pagu Pengadaan Barang/Jasa) x 100%
- f) Persentase Pengelolaan BMN PPN Pengembangan (Persen)
 - Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat Pengelolaan BMN lingkup DJPT yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- g) Nilai IKPA PPN Pengembangan (Nilai)
 - Realisasi Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan
- h) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PPN Pengembangan (Nilai)
 - Realisasi perencanaan anggaran UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (%)
- i) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan
 - Nilai survei dari masyarakat melalui Si Susan KKP (Aplikasi)

Informasi *cascading* Indikator Kinerja Utama (IKU) Level I kepada bawahan (Level II), seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. Tabel Informasi Cascading / Turunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Level I kepada bawahan (Level II)

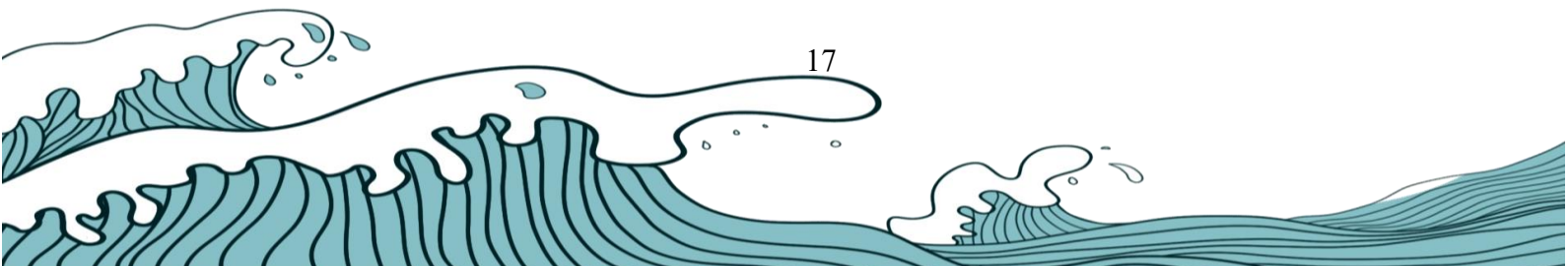
N o	Sasaran	Indikator Kinerja		Frekuensi	Perhitungan	Satuan	Target
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Pengembangan	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Rp Juta)	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Juta	790.51
2	Produktivitas perikanan tangkap di PPN Pengembangan meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan (Ton)	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Ton	20,366.43
3	Pengelolaan PPN Pengembangan yang optimal dan bertanggung jawab	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan (Persen)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Persen	100.00
		4	Tingkat Kinerja PPN Pengembangan (Nilai)	Triwulan	Rata-rata	Nilai	86.00
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Persen	86.00
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Persen	10,50
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	Triwulan	Rata-rata	Nilai	33.00
4		8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Kapal	1,851.00

	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di PPN Pengembangan	9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	Semester	Rata-rata	Nilai	0.28
7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Nilai	75.50
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Persen	86.00
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Nilai	88.20
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)	Semester	Nilai Posisi Akhir	Indeks	84.50
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Persen	77.00
		15	Persentase Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Persen	82.00
		16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	Semester	Nilai Posisi Akhir	Nilai	92.10
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Nilai	71,75
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Nilai	88.80

B. Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2026

Penetapan kinerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan adalah dokumen perjanjian kinerja yang berisikan penugasan dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan untuk melaksanakan program dan kegiatan pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolak ukur pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, berikut ini adalah IKU UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan yang di *cascading* dari Dirjen Perikanan Tangkap kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebagai berikut :



Tabel 4. Target Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Pengembangan	1	Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Pengembangan (Rp Juta)	790,511
2	Produktivitas perikanan tangkap di PPN Pengembangan meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan (Ton)	20.366,43
3	Pengelolaan PPN Pengembangan yang optimal dan bertanggung jawab	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan (Persen)	100
		4	Tingkat Kinerja PPN Pengembangan (Nilai)	86
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	86
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	10,50
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	33
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di PPN Pengembangan	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	1.851
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,28
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	75,5
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	86
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	88,2
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)	84,5
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	77
		15	Persentase Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	82
		16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	92,1
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	71,75
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	88,8

Adapun pagu anggaran yang terdapat pada DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan untuk Triwulan I Tahun 2026 dapat di komposisikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Komposisi Target dan Realisasi Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Triwulan I Tahun 2026

KODE AKUN	URAIAN	PAGU	TARGET TAHUN 2026		REALISASI TW I TAHUN 2026		
			TARGET	% PAGU	REALISASI	% TARGET	% PAGU
032.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	274.869.432.000	284.244.914	0,10%	284.244.914	100%	0,10%
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	274.869.432.000	284.244.914	0,10%	284.244.914	100%	0,10%
2338.BGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi[Base Line]	404.898.000	15.973.790	3,95%	15.973.790	100%	3,95%
2338.BGA.002	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	404.898.000	15.973.790	3,95%	15.973.790	100%	3,95%
2338.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan[Base Line]	274.464.534.000	268.271.124	0,10%	268.271.124	100%	0,10%
2338.RBQ.003	Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM I	274.464.534.000	268.271.124	0,10%	268.271.124	100%	0,10%
032.03.WA	Program Dukungan Manajemen	13.461.424.000	2.879.858.825	21,39%	2.879.858.825	100%	21,39%
2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	13.461.424.000	2.879.858.825	21,39%	2.879.858.825	100%	21,39%
2342.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi[Base Line]	22.500.000	0	0,00%	0		0,00%
2342.CAN.955	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	22.500.000	0	0,00%	0		0,00%
2342.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	13.323.924.000	2.867.693.346	21,52%	2.867.693.346	100%	21,52%
2342.EBA.994	Layanan Perkantoran	13.323.924.000	2.867.693.346	21,52%	2.867.693.346	100%	21,52%
2342.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	115.000.000	12.165.479	10,58%	12.165.479	100%	10,58%
2342.EBB.951	Layanan Sarana Internal	21.500.000	4.665.479	21,70%	4.665.479	100%	21,70%
2342.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	93.500.000	7.500.000	8,02%	7.500.000	100%	8,02%

C. Rencana Aksi Penetapan Kinerja

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target – target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen RKAKL. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulanan) terhadap pencapaian indikator output kinerja dan anggaran. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU **Perspektif Internal Process** dan **Learning and Growth** yang disandingkan

dengan indikator kegiatan pada pencapaian Form DA setiap bulannya sehingga di dapat persentase pencapaian secara berkala.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan tahun 2019 telah melaksanakan penilaian indikator kinerja utama sebanyak 13 (Tiga belas) dengan mengacu pada *Balanced Scorecard* (BSC). Pada tahun 2026, terdapat 5 (lima) sasaran strategis dengan rincian 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Utama dan 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Tambahan. Dari perhitungan angka realisasi terhadap indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2026 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) menurut *Balanced Scorecard* (BSC) sebesar **108,45%** dengan rincian pada Tabel berikut.

Tabel 6. Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I Tahun 2026

Kode		Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
						2026	MARET	MARET		s/d MARET	s/d MARET	
S.01		Nilai PNB Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Pengembangan						100,7			100,7	
	IKS.1	Penerimaan PNB Non SDA di PPN Pengembangan (Rp Juta)	Juta Rupiah	Maximize	Nilai Posisi Akhir	790,51	135	135,95	100,7	135	135,95	100,7
S.02		Produktivitas perikanan tangkap di PPN Pengembangan meningkat						108,4			108,4	
	IKS.0 2.1	Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan (Ton)	Ton	Maximize	Nilai Posisi Akhir	20.366,43	3.500,00	3.794,00	108,4	3.500,00	3.794,00	108,4
		-										
S.03		Pengelolaan PPN Pengembangan yang optimal dan bertanggung jawab						116,9			116,9	
	IKS.0 3.1	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan (Persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	0			0	0	
	IKS.0 3.2	Tingkat Kinerja PPN Pengembangan (Nilai)	Nilai	Maximize	Rata-rata	86	86	98,75	114,83	86	98,75	114,83
		-										
	IKS.0 3.3	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86	0			0	0	

IKS.0 3.4	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	10,5	0			0	0	
IKS.0 3.5	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	Nilai	Maximize	Rata-rata	33	33	85,35	120	33	85,35	120
	-										
S.04	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di PPN Pengembangan						103,46			103,46	
IKS.0 4.1	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	Kapal	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1.851,00	1.821,00	1.884,00	103,46	1.821,00	1.884,00	103,46
	-										
IKS.0 4.2	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	Nilai	Maximize	Rata-rata	0,28	0			0	0	
S.05	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan						112,8			112,8	
IKS.0 5.1	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75,5	0			0	0	
IKS.0 5.2	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86	86	100	116,28	86	100	116,28
	-										
IKS.0 5.3	Penilaian Mandiri SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,2	0			0	0	
IKS.0 5.4	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	84,5	0			0	0	
IKS.0 5.5	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	77	77	100	120	77	100	120
	-										
IKS.0 5.6	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82	0			0	0	

		Pengembangan (Persen)										
	IKS.0 5.7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,1	0			0	0	
	IKS.0 5.8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71,75	0			0	0	
	IKS.0 5.9	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,8	88,8	90,67	102,11	88,8	90,67	102,11

Dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap melalui evaluasi kinerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Triwulan I Tahun 2026 diukur melalui 18 indikator kinerja. Adapun pembahasan masing-masing indikator kinerja akan dicantumkan pada sub bab berikut sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1

Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Pengembangan

IKU 1 – Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Rp Juta)

Indikator Nilai PNBP Non SDA PPN Pengembangan adalah seluruh penerimaan PPN Pengembangan yang merupakan pelaksanaan dari fungsi perusahaan PPN Pengembangan sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional PPN Pengembangan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 4/PER-DJPT/2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Luar

Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan. Sedangkan PNBP Umum dari penerimaan sewa tanah dan/atau bangunan yang mengacu pada PP 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Non SDA PPN Pengembangan terdiri atas penerimaan umum dan penerimaan fungsional. Penerimaan umum berasal dari Penerimaan sewa tanah dan/atau bangunan, Pendapatan dari lelang Bangunan, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran dan Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu. Sedangkan penerimaan fungsional merupakan pendapatan yang diperoleh Pelabuhan yang berasal dari pelayanan jasa yang ada di PPN Pengembangan. Kegiatan pelayanan jasa di PPN Pengembangan adalah sebagai berikut:

- Pelayanan Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam Pelabuhan;
- Pelayanan Jasa Air;
- Pelayanan Jasa *Cold Room dan Freezer*;
- Pelayanan Jasa Kendaraan (Truk Refrigerator, Dump Truk dll);
- Pelayanan Jasa Penumpukan Barang/Penjemuran jaring/ikan;
- Pelayanan Jasa Pas Masuk;
- Pelayanan Jasa Kebersihan Pelabuhan;
- Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana;
- Pelayanan Jasa Listrik;

Target indikator ini diukur dengan metode pengukuran triwulanan.

Tabel 7. Rincian Capaian Indikator

Sasaran Kegiatan – 1		Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Pengembangan			
Indikator Kinerja – 1		Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Rp Juta)			
Triwulan I Tahun 2025		Triwulan I Tahun 2026		% Capaian Terhadap	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi Tw I Tahun 2025	Target Tw I Tahun 2026

195	231,88	135	135,95	118,91	100,70
-----	--------	-----	--------	--------	--------

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan memiliki realisasi lebih besar dari target yang telah ditentukan. Target Triwulan I Tahun 2026 yaitu 135 juta rupiah sedangkan realisasi sebesar 135,95 juta rupiah atau mencapai 100,70%. Capaian Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan berasal dari Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan dan SKPT PP Teluk Awang (Pelabuhan Binaan PPN Pengembangan).

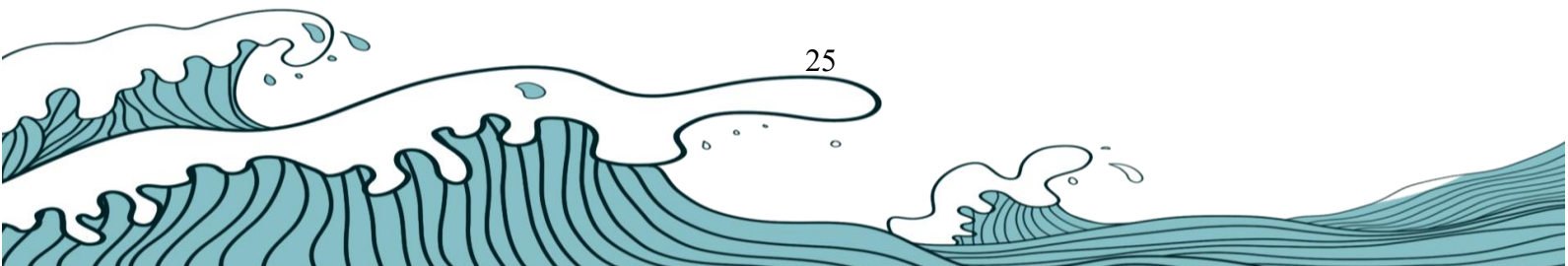
b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Berdasarkan data tersebut di atas, capaian Triwulan I Tahun 2026 lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 yaitu sebesar 118,91%. Hal ini disebabkan karena pada penerimaan jasa sewa tanah dan/atau bangunan, jasa kebersihan untuk tahun 2026 dilakukan secara periodisitas yakni dibayar bulanan sedangkan di tahun 2025 dibayar sekaligus setiap tahun sehingga penerimaan di tahun 2026 lebih rendah dari tahun 2025. Selain itu kapal di Teluk Awang sudah berpindah ke PP. Tanjung wangi sehingga PNBP Non SDA dari PP. Teluk Awang berkurang. Pada PNBP Non SDA Jasa pembayaran air dan listrik menggunakan tagihan sesuai pemakaian yang tertera pada meteran air atau listrik, untuk jasa pas masuk kendaraan tidak banyak produksi ikan sehingga kendaraan yang beraktifitas berkurang. Sementara di Pelabuhan Teluk Awang karena berkurangnya kapal - kapal di Pelabuhan tersebut sehingga tidak ada investasi.

c. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tabel 8. Perbandingan dengan Satker Lain

Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Pekalongan	Persentase
135,95	138,17	98,39



Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mencapai 98,39%. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan penerimaan dan kondisi kepatuhan masyarakat, dimana di PPN Pengembangan masih kehilangan penerimaan pada pelayanan jasa pas masuk karena masih banyak pintu masuk dan belum menggunakan palang pintu otomatis sehingga mereka dapat leluasa keluar masuk pelabuhan tanpa membayar pas masuk. Terkait perubahan mekanisme pembayaran sewa tanah dan bangunan yang semula dibayarkan sekaligus per tahun menjadi dilakukan secara bulanan/periodisitas sehingga berpengaruh pada penerimaan Triwulan I dimana pembayaran sewa pada tahun 2025 dilakukan secara sekaligus biasanya dilakukan pada triwulan I sehingga di tahun 2025 penerimaan di Triwulan I lebih tinggi daripada penerimaan Triwulan I tahun 2026. Selain itu permasalahan perizinan juga menjadi fokus permasalahan yang sampai saat ini masih terdapat kapal yang dalam proses penyelesaian perizinan sehingga menghambat penerimaan tambat labuh.

d. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Jika dilihat dari penerimaan yang ada, pada tahun 2026 penerimaan di PPN Pengembangan lebih tinggi daripada PP. Teluk Awang, hal ini dikarenakan di PP Teluk Awang, kapal-kapal yang mendaratkan ikan di PP Teluk Awang banyak yang berpindah ke PP. Tanjung Wangi sehingga penerimaan PNPB Non SDA berkurang dari penerimaan tambat labuh, pas masuk maupun penggunaan tanah dan sarana prasarana. Penerimaan *cold storage* pada tahun 2026 cenderung mengalami penurunan karena tidak adanya ketersediaan anggaran untuk pembayaran listrik jika *cold storage* dijalankan. Penerimaan *cold storage* ini merupakan sumber penerimaan tertinggi sehingga jika tidak ada penerimaan dari *cold storage* akan sangat berdampak terhadap penerimaan PNPB Non SDA PPN Pengembangan. Penerimaan Pas masuk juga menurun dari tahun sebelumnya karena tidak dapat dilakukan secara maksimal, hal ini disebabkan belum adanya pagar kawasan pelabuhan sehingga akses masuk menuju pelabuhan tidak satu pintu/terdapat jalan tikus sehingga banyak yang lolos dari jasa Pas masuk. Kurangnya jumlah petugas pas masuk juga berpengaruh pada penerimaan Pas masuk. Dengan adanya pagar kawasan pelabuhan diharapkan dapat menjadi solusi dari keamanan dan peningkatan penerimaan PNPB di PPN Pengembangan. Selain itu permasalahan perizinan juga menjadi fokus permasalahan



yang sampai Triwulan I masih terdapat kapal yang masih dalam proses penyelesaian perizinan sehingga menghambat penerimaan tambat labuh. Adanya perubahan mekanisme pembayaran sewa tanah dan bangunan dari pembayaran sekaligus per tahun menjadi periodisitas/bulanan sehingga penerimaan dari sewa tanah di tahun 2026 lebih rendah karena diterima per bulan.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 9. Realisasi anggaran mendukung IKU

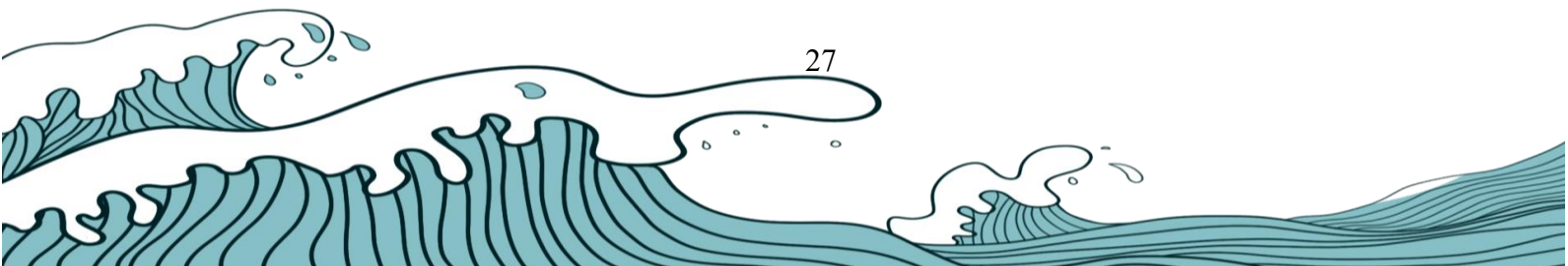
IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)		
Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan	17,20	66.988.000	-	11.522.140	11.522.140	17%	93%

Pada Triwulan I Tahun 2026, belum terdapat realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan. Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 17%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan adalah Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

f. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Perhitungan dari indikator ini diperoleh dari pencapaian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh dari Pelayanan jasa tambat labuh dan kebersihan kolam pelabuhan, Pelayanan Kebersihan kawasan pelabuhan, Pelayanan jasa Pengadaan Air, Pelayanan Listrik, Pelayanan *Pas* Masuk, Sewa Tanah dan bangunan, Jasa Penumpukan, Pelayanan jasa penggunaan kendaraan/*dump truck*, Pelayanan Jasa Penggunaan *Cold Storage* di PPN Pengembangan.

Pendapatan PNBPN Non SDA untuk *Pas* Masuk ini dapat dilakukan dengan maksimal jika penjagaan di pintu masuk dapat dilakukan dengan baik, dengan didirikan



pagar Kawasan. Namun jika tidak terdapat pagar kawasan pengunjung dapat lewat melalui pintu masuk lainnya sehingga penerimaan pas masuk banyak yang tidak terpungut. Dengan adanya ketersediaan anggaran untuk pembayaran penggunaan listrik dimungkinkan *coldstorage* dapat beroperasi lagi sehingga dapat meningkatkan penerimaan PNBP Non SDA. Selain itu penyelesaian proses perizinan perlu dipercepat sehingga dapat meningkatkan penerimaan tambat labuh dan kebersihan kolam pelabuhan. Karena dengan adanya kelengkapan dokumen perizinan, maka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dapat berjalan dengan lancar dan pembayaran tambat labuh juga akan langsung dilakukan oleh pengguna jasa melalui aplikasi SIJAKA.

Sasaran Strategis 2

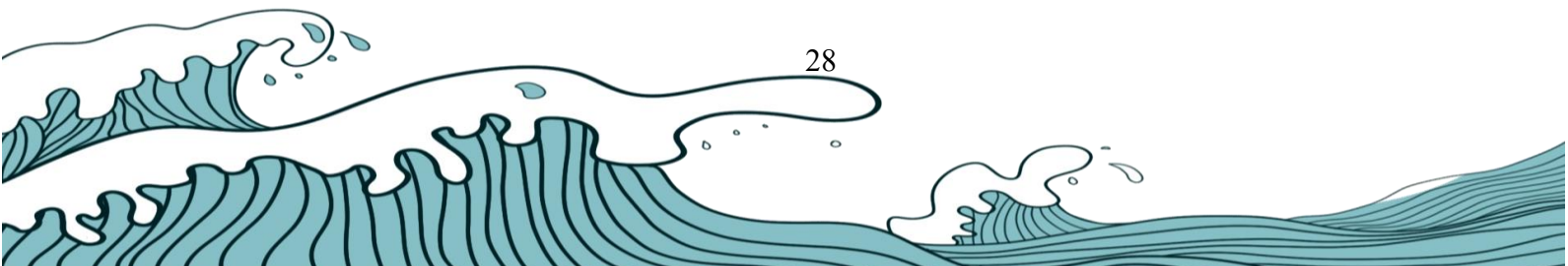
Produktivitas perikanan tangkap di PPN Pengembangan

IKU 2 – Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan (Ton)

Indikator Kinerja Utama Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan merupakan hasil dari volume produksi yang didaratkan perusahaan perikanan serta pelabuhan perikanan. Realisasi produksi perikanan tangkap PPN Pengembangan dilaporkan secara berkala setiap triwulan.

Tabel 10. Rincian Capaian Indikator

Sasaran Kegiatan – 2		Produktivitas perikanan tangkap di PPN Pengembangan			
Indikator Kinerja – 2		Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan			
Triwulan I Tahun 2025		Triwulan I Tahun 2026		% Capaian Terhadap	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi Tw I Tahun 2025	Target Tw I Tahun 2026
3000	5046	3500	3794	168,2	108,40



a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Secara umum hasil perikanan tangkap di PPN Pengembangan diperoleh dari usaha penangkapan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang terbuat dari jaring dan tali temali seperti pancing. Hasil dari usaha tangkapan ikan tersebut dikonsumsi sendiri oleh nelayan atau rumah tangga perikanan dan juga didistribusikan baik di dalam provinsi Bali maupun luar Bali .

Perkembangan produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan pada triwulan I tahun 2026 yaitu mencapai 3794 ton dari target yang telah ditentukan sebesar 3500 ton. Hasil produksi perikanan tersebut mencapai target sebesar 108,40%. Jumlah realisasi dapat melebihi target karena didukung dengan cuaca yang baik sehingga menyebabkan kapal perikanan dapat melakukan usaha penangkapan lebih optimal dan hasil produksi meningkat.

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu

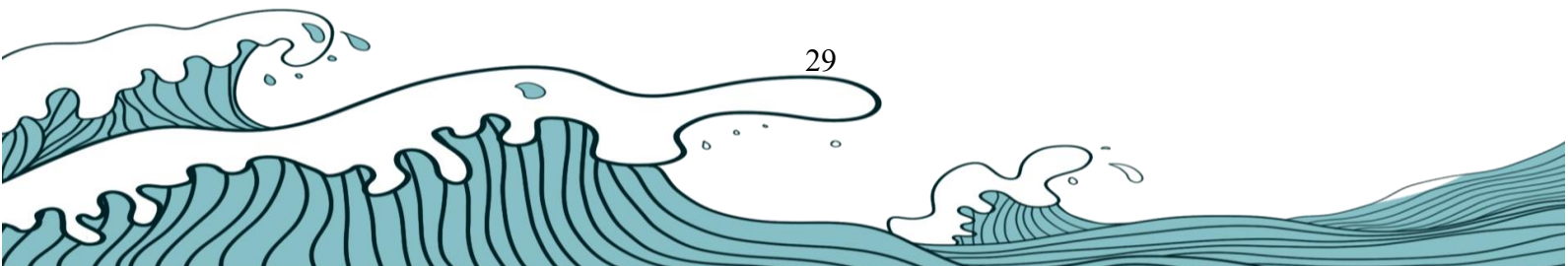
Berdasarkan data di atas, capaian Triwulan I Tahun 2026 lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 sebesar 168,20%. Triwulan I Tahun 2026 sebesar 3794 ton sedangkan realisasi Triwulan I Tahun 2025 sebesar 5046 ton. Salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah produksi triwulan I Tahun 2026 lebih rendah daripada capaian Triwulan I Tahun 2025 yaitu jumlah hari kerja kapal perikanan yang melakukan *trip*. Pada Triwulan I Tahun 2025 jumlah hari kerja 76 hari, sedangkan Triwulan I Tahun 2026 jumlah hari kerja 55 hari.

c. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tabel 11. Perbandingan dengan Satker Lain

Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Pekalongan	Persentase
3794	1460	259,86

Jika dibandingkan dengan capaian di PPN Pekalongan, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebesar 259,86%. Faktor yang mempengaruhi hasil tangkapan yaitu cuaca dan musim ikan serta perbedaan jumlah armada kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan.



d. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan penangkapan sangat dipengaruhi oleh tingkat upaya penangkapan yang dilakukan oleh nelayan. Upaya penangkapan merupakan ukuran untuk menghasilkan sejumlah hasil tangkapan atau ukuran produktivitas dari unit penangkapan ikan. Keberhasilan dan kegagalan dari produksi perikanan tangkap dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Kondisi cuaca/alam, yaitu apabila keadaan cuaca kurang baik maka hasil produksi akan menurun karena para nelayan tidak dapat menangkap ikan, sehingga
2. Ketersediaan teknologi, yaitu gerombolan ikan yang akan ditangkap nelayan sering berada di luar jangkauan kapal penangkapan ikan sehingga nelayan tidak mampu menangkap ikan.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

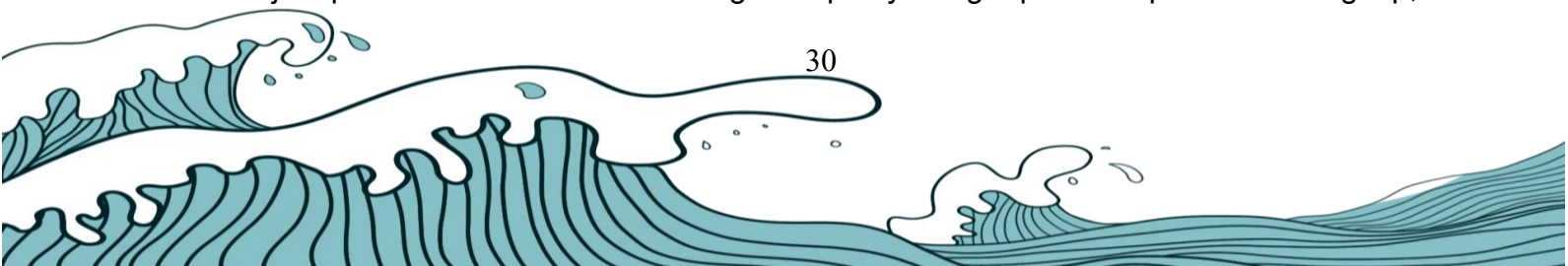
Tabel 12. Realisasi anggaran mendukung IKU

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)		
Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan	18,63%	50.502.00	-	9.407.863	9.407.863	19%	97%

Pada Triwulan I Tahun 2026, belum terdapat realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan. Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 19%. Sumber Daya Manusia (SDM) yang menunjang terlaksananya capaian volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan adalah Tim Kerja Operasional Pelabuhan dan Operator PIPP sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh PPN Pengembangan khususnya Tim Kerja Operasional dalam mendukung tercapainya target produksi perikanan tangkap,



yaitu rutin melakukan enumerasi produksi perikanan tangkap pada hari kerja maupun hari libur, sinkronisasi data kapal bongkar dengan Kesyahbandaran dan TKPU, dan sinkronisasi data perikanan tangkap dengan TPI dan Dinas Perikanan Kabupaten Jembrana.

Berdasarkan kegiatan pendataan yang telah dilakukan, pada Triwulan I tahun 2026 jumlah produksi mencapai 3794 Ton dari target Triwulan I 2026 yang telah ditentukan yaitu 3500 Ton. Tim kerja operasional pelabuhan terus berusaha memaksimalkan pendataan setiap harinya dan ditunjang dengan sosialisasi tentang perkiraan cuaca dan tinggi gelombang agar nelayan lebih efektif dan efisien dalam melakukan trip penangkapan

Sasaran Strategis 3

Pengelolaan PPN Pengembangan yang Optimal dan Bertanggung Jawab

IKU 04 - Tingkat Kinerja PPN Pengembangan (Nilai)

Indikator ini merupakan nilai tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan. Penilaian indikator kinerja pelabuhan perikanan sesuai standar yang telah ditetapkan adalah dengan mengumpulkan laporan operasional untuk dievaluasi sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melalui SK. No 20/KEP/DJPT/2015 tentang pedoman evaluasi kinerja operasional pelabuhan perikanan. Dengan adanya indeks/nilai operasional pelabuhan perikanan maka dapat menjadi acuan sebagai indikator dalam mengukur perkembangan kinerja operasional.

Tabel 13. Rincian Capaian Indikator

Sasaran Kegiatan – 3		Pengelolaan PPN Pengembangan yang Optimal dan Bertanggung Jawab			
Indikator Kinerja – 4		Tingkat Kinerja PPN Pengembangan (Nilai)			
Triwulan I Tahun 2025		Triwulan I Tahun 2026		% Capaian Terhadap	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi Tw I Tahun 2025	Target Tw I Tahun 2026

85	99	86	98,75	116,47	114,83
----	----	----	-------	--------	--------

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan memiliki realisasi lebih besar dari target yang telah ditentukan. Target Triwulan I Tahun 2026 yaitu 86 sedangkan realisasi sebesar 98,75 atau mencapai 114,83%.

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Berdasarkan data tersebut di atas, capaian Triwulan I Tahun 2026 lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 sebesar 116,47%. Triwulan I Tahun 2026 sebesar 98,75 sedangkan realisasi Triwulan I Tahun 2025 sebesar 99. Faktor yang mempengaruhi capaian Triwulan I Tahun 2026 sedikit lebih rendah dibandingkan capaian Triwulan I Tahun 2025, yaitu target kinerja yang ditentukan sedikit lebih tinggi dibandingkan Tahun 2025.

c. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

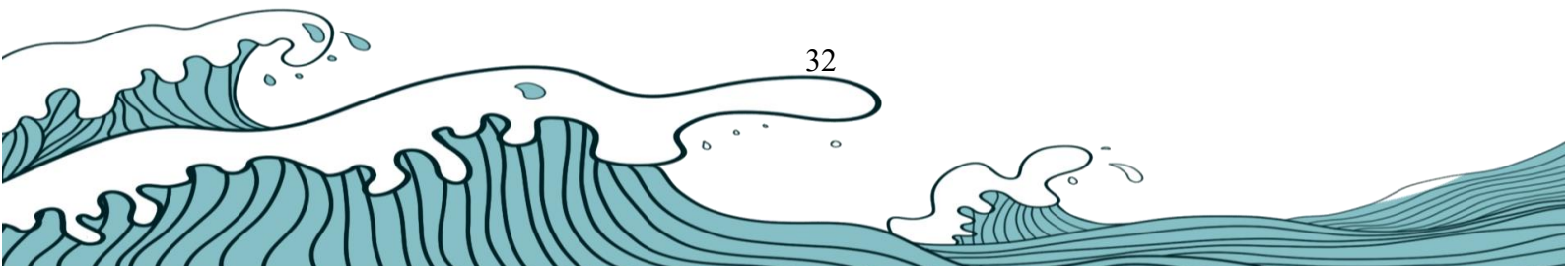
Tabel 14. Perbandingan dengan Satker Lain

Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Pekalongan	Persentase
98,75	95,13	103,81

Jika dibandingkan dengan capaian di PPN Prigi, capaian di PPN Pengembangan mencapai 103,81%.

d. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Berdasarkan nilai realisasi Tingkat Kinerja Operasional Pelabuhan pada Triwulan I Tahun 2026 yaitu 98,75 dengan kategori sangat baik. Hal tersebut menggambarkan bahwa pengelolaan PPN Pengembangan berjalan efektif dan optimal menunjang pengembangan pelabuhan perikanan yang lebih baik. Evaluasi kinerja operasional ini sangat dibutuhkan untuk memberikan gambaran kinerja suatu pelabuhan dan hasilnya dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijakan yang akan



diambil oleh pemerintah pusat dan daerah sehingga keberadaannya dirasakan manfaatnya oleh nelayan dan *stakeholder* lainnya.

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan pada aplikasi PIPP dilakukan setiap bulan dan selanjutnya akan dianalisa pada setiap indikator. Ruang lingkup penilaian antara lain fasilitas pelabuhan perikanan, administrasi dan sistem informasi, pelayanan umum dan pelayanan penarikan PNBP, penyaluran BBM, investasi dan industri yang ada di pelabuhan serta kegiatan K5. Dari beberapa indikator dalam evaluasi, terdapat indikator pada kategori Pelayanan Umum yang sangat berpengaruh terhadap penilaian, yaitu pelayanan tambat labuh, produksi perikanan, frekuensi kunjungan kapal, penerbitan STBLKK, serta pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis. Jika pelayanan tersebut maksimal, maka akan mendapatkan nilai yang maksimal pula pada aplikasi PIPP.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 15. Realisasi anggaran untuk mendukung IKU

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)		
Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan	114,83%	126.854.000	5.357.389	145.660.843	140.303.454	111%	357%

Pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan adalah sebesar Rp 5.357.389,00. Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 111%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Tingkat Kinerja PPN Pengembangan adalah penanggung jawab masing-masing kriteria pada masing-masing Tim kerja dan operator PIPP sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

f. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang kinerja

Program yang telah dilakukan untuk mendukung tercapainya target Tingkat Kinerja Operasional Pelabuhan yaitu pelaksanaan input data operasional pelabuhan



secara rutin sebelum data ditarik oleh pusat. Beberapa data yang harus diinput yaitu realisasi anggaran, pendapatan pelabuhan, produksi perikanan, pelayanan tambak labuh, frekuensi kunjungan kapal, sosialisasi dan bimbingan teknis, pelaksanaan K5, penyaluran air bersih, penyaluran BBM, pemanfaatan lahan, dan penyerapan tenaga kerja. Data operasional pelabuhan tersebut didukung dari seluruh tim kerja yang ada di PPN Pengembangan. Indikator atau program lain yang masih memiliki peluang untuk dapat ditingkatkan yaitu fasilitasi perizinan kapal perikanan, dan peningkatan perusahaan pada WKOPP PPN Pengembangan.

f. IKU 07 - Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)

Indikator Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan merupakan indikator baru yang ada di tahun 2023. Pengendalian Lingkungan merupakan indikator yang memuat kegiatan yang dilakukan dalam menjaga kondisi lingkungan yang sesuai dengan standar. Kegiatan ini juga di pantau melalui aplikasi SELARASKAN (Sistem Pelaporan Ragam Informasi Lingkungan Pelabuhan Perikanan).

Tabel 16. Rincian Capaian Indikator

Sasaran Kegiatan – 3		Pengelolaan PPN Pengembangan yang Optimal dan Bertanggung Jawab			
Indikator Kinerja – 7		Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)			
Triwulan I Tahun 2025		Triwulan I Tahun 2026		% Capaian Terhadap	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi Tw I Tahun 2025	Target Tw I Tahun 2026
30,10	90,52	33,00	85,35	300,73	258,64

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan memiliki realisasi lebih besar dari target yang telah ditentukan. Target



Triwulan I Tahun 2026 yaitu 33,00 sedangkan realisasi sebesar 85,35 atau mencapai 258,64%. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan dapat tercapai karena kerjasama dari semua Tim Kerja sehingga kegiatan/*evidence* yang harus dilakukan sesuai dengan permintaan data pada aplikasi SELARASKAN dapat dilakukan dan mendapatkan nilai yang semaksimal mungkin.

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Berdasarkan data tersebut di atas, capaian Triwulan I Tahun 2026 lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 sebesar 300,73%, namun tetap lebih tinggi dari target yang telah ditentukan. Triwulan I Tahun 2026 sebesar 85,35 sedangkan realisasi Triwulan I Tahun 2025 sebesar 90,52. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan penilaian pada pengujian air dan udara di Aplikasi Selaraskan dan adanya perubahan petugas untuk *evidence* pengolahan sampah sehingga diperlukan penyesuaian dalam proses pengumpulan evidence terkait.

c. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tabel 17. Perbandingan dengan Satker Lain

Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Pekalongan	Persentase
85,35	74,54	114,50

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mencapai 114,50%. Capaian PPN Pengembangan lebih tinggi daripada PPN Pekalongan. Hal ini disebabkan karena perbedaan fasilitas yang tersedia di masing-masing Pelabuhan.

d. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Pada IKU Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sudah tercapai, keberhasilan ini karena adanya dukungan dan komitmen Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan dalam pemenuhan penilaian yang dipersyaratkan pada aplikasi SELARASKAN. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian ini perlu adanya peningkatan fasilitas misalnya dalam pengolahan sampah, selama ini kita melakukan pengolahan sampah



secara manual dengan mengolah sampah daun menjadi pupuk kompos. Sedangkan untuk pengolahan yang lebih efektif dan efisien diperlukan alat pengolah sampah sehingga diperlukan anggaran untuk pengadaan alat tersebut. Selain itu untuk meningkatkan nilai SELARASKAN pada *evidence* pengukuran kualitas air dan udara diperlukan anggaran untuk pengujian melalui laboratorium karena dengan hasil pengujian laboratorium akan diperoleh nilai yang maksimal jika dibanding dengan pengukuran menggunakan alat yang sederhana yang biasa kita lakukan nilainya sangat kurang. Oleh karena itu ketersediaan anggaran sangat menentukan dalam capaian nilai SELARASKAN.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 18. Realisasi anggaran mendukung IKU

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)		
Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan	258,64%	70.530.000	1.500.000	182.416.227	180.916.227	257%	691%

Pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan adalah sebesar Rp 1.500.000,00. Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 257%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan adalah Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha dan Operator Selaraskan sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian IKU ini yakni kegiatan terkait uji kualitas air dan udara yang dilakukan setiap semester. Dengan adanya ketersediaan anggaran untuk uji kualitas ini diharapkan nilai dari Selaraskan dapat



lebih maksimal. Adapun Uji yang dilakukan melalui Laboratorium BPISDKP, Hyperkes serta Unilab. Selain uji kualitas air dan uji kualitas udara, kegiatan lain yang menunjang seperti kegiatan kebersihan, pemeliharaan, publikasi media juga dapat menunjang penilaian dalam selaraskan. Dengan adanya Gerakan Penanganan Sampah sesuai dengan arahan dari Pusat, PPN Pengembangan melakukan pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos yang merupakan salah satu evidence di SELARASKAN sehingga diperlukan anggaran untuk pengadaan alat pengolah/pencacah sampah organik untuk mempermudah dan mempercepat proses pembuatan kompos. Dalam pencapaian indikator tersebut perlu adanya Kerjasama dalam Tim Kerja Pelabuhan.

Sasaran Strategis 4

Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutann di PPN Pengembangan

IKU-08 Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)

Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan merupakan Indikator laporan atas hasil pelaksanaan perijinan terhadap kapal perikanan yang terdaftar di PPN Pengembangan, antara lain Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP). SKKP adalah surat kapal yang menyatakan bahwa Kapal Perikanan memenuhi aspek kelaiklautan dan kelaiktangkapan untuk keselamatan pelayaran. PPN Pengembangan sebagai UPT DJPT KKP melayani pengurusan SKKP dengan kapal yang memiliki ijin daerah dengan ukuran kapal dibawah 30GT.

Tabel 19. Rincian Capaian Indikator

Sasaran Kegiatan – 4		Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutann di PPN Pengembangan			
Indikator Kinerja – 8		Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)			
Triwulan I Tahun 2025		Triwulan I Tahun 2026		% Capaian Terhadap	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi Tw I Tahun 2025	Target Tw I Tahun 2026

1450	1525	1821	1884	105,17	103,46
------	------	------	------	--------	--------

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan memiliki realisasi yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan. Target Triwulan I Tahun 2026 yaitu 1821 kapal sedangkan realisasi sebesar 1884 kapal atau mencapai 103,46%. Realisasi pada indikator ini lebih tinggi dari target karena PPN Pengembangan memaksimalkan pelayanan penerbitan SKKP hingga ke NTT dan NTB, dan dukungan dari pelaku usaha untuk patuh pada aturan mengenai perijinan kelaikan kapal perikanan sehingga proses pelayanan SKKP berjalan dengan lancar.

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

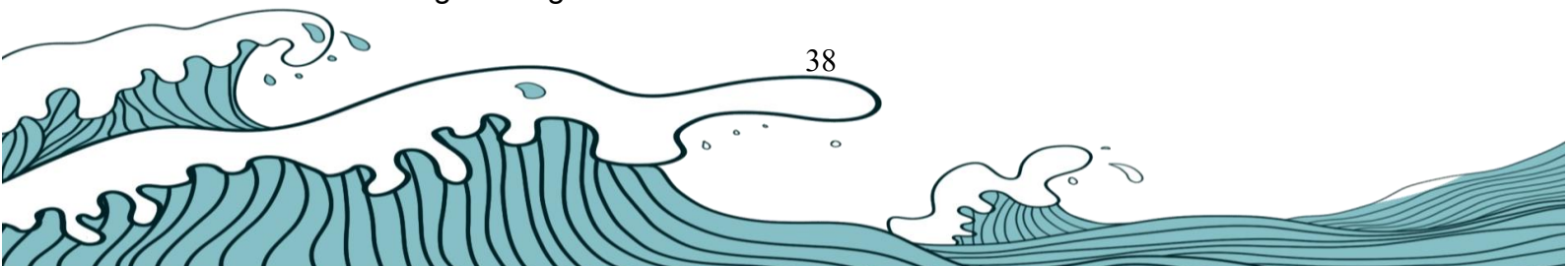
Berdasarkan data tersebut di atas, capaian Triwulan I Tahun 2026 sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 sebesar 105,17%. Walaupun secara kuantitas capaian Triwulan I tahun 2026 lebih besar, yaitu sebanyak 1884 dokumen kapal. Sedangkan capaian Triwulan I tahun 2025 sebanyak 1525 dokumen kapal. Hal ini dikarenakan target yang ditetapkan pada tahun 2026 lebih besar dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2025.

c. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tabel 20. Perbandingan dengan Satker Lain

Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Pekalongan	Persentase
1884	619	304,36

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mencapai 304,36%. Hal ini disebabkan karena tingginya permohonan penerbitan SKKP dan jangkauan daerah pelayanan penerbitan SKKP yang dilakukan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan lebih luas dibandingkan dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan.



d. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Penerbitan SKKP di PPN Pengembangan pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 1884 dokumen. Jumlah sertifikat tersebut merupakan hasil dari pemeriksaan kelaikan kapal perikanan yang telah dilaksanakan oleh petugas kelaikan, mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Pada Triwulan I Tahun 2026 penerbitan SKKP dilakukan dengan skema reguer yaitu melalui portal SICEFI (Cek Fisik dan Sertifikat kelaikan Kapal Perikanan/ SKKP Online) yakni dengan melakukan pemeriksaan cek fisik kapal perikanan di lapangan. Tingginya pengajuan penerbitan SKKP yang mencakup ketiga provinsi tersebut merupakan salah satu faktor yang menunjang tercapainya target penerbitan SKKP.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 21. Realisasi anggaran mendukung IKU

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)		
Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan	101,78%	-	-	-	-	-	-

Pada Triwulan I Tahun 2026, untuk mendukung capaian indikator Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan, anggaran untuk pelaksanaannya semua berasal dari Direktorat Kapal dan Alat Penangkapan Ikan serta PPN Pengembangan. Dengan demikian secara anggaran di Satker PPN Pengembangan terjadi efisiensi 100%.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pelaksanaan pengajuan ijin kapal daerah khususnya pemenuhan dokumen SKKP ini tidak lepas dari kesadaran pelaku usaha perikanan tangkap untuk patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan mengenai kelengkapan ijin berusaha di sektor perikanan tangkap. Masa berlaku dokumen SKKP yaitu satu tahun sejak dari tanggal diterbitkan sertifikat tersebut sehingga pelaku usaha wajib memperpanjang ijin



kelaikan kapal perikanan agar kapal tersebut dapat melakukan *trip* kembali. Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tercapainya IKU ini yaitu dengan melaksanakan pendampingan dari petugas pelayanan SKKP kepada nelayan/pemilik/perusahaan kapal perikanan terkait mekanisme penerbitan perijinan SKKP, yang meliputi proses pengajuan maupun syarat yang harus dipenuhi seperti dokumen kapal dan perlengkapan keselamatan kapal yang harus ada saat proses pemeriksaan kelaikan kapal perikanan berlangsung.

Sasaran Strategis 5

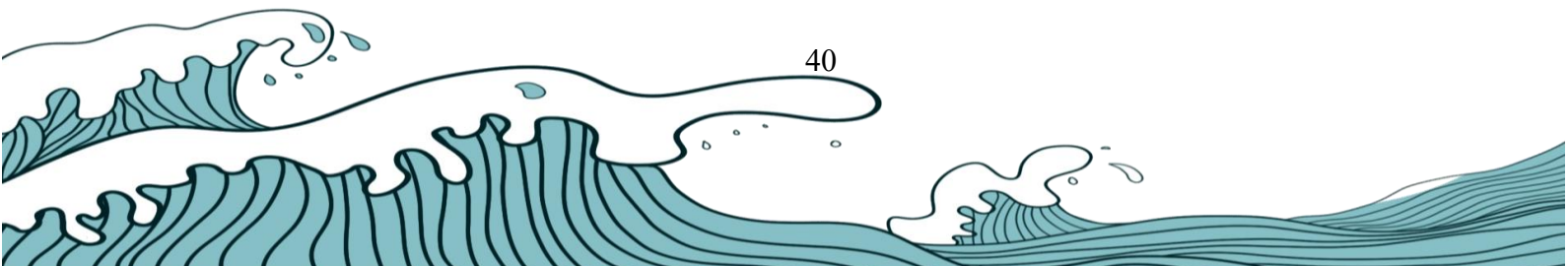
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan

IKU- 11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)

Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mengacu pada jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada setiap triwulan yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan.

Tabel 22. Rincian Capaian Indikator

Sasaran Kegiatan – 4		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan			
Indikator Kinerja – 8		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)			
Triwulan I Tahun 2025		Triwulan I Tahun 2026		% Capaian Terhadap	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi Tw I Tahun 2025	Target Tw I Tahun 2026



85	100	86	100	117,65	116,28
----	-----	----	-----	--------	--------

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan memiliki realisasi yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan. Target Triwulan I Tahun 2026 yaitu 86 sedangkan realisasi sebesar 100 atau mencapai 116,28%.

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Berdasarkan data tersebut di atas, capaian Triwulan I Tahun 2026 sama dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 yaitu mencapai lebih dari 100%.

c. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

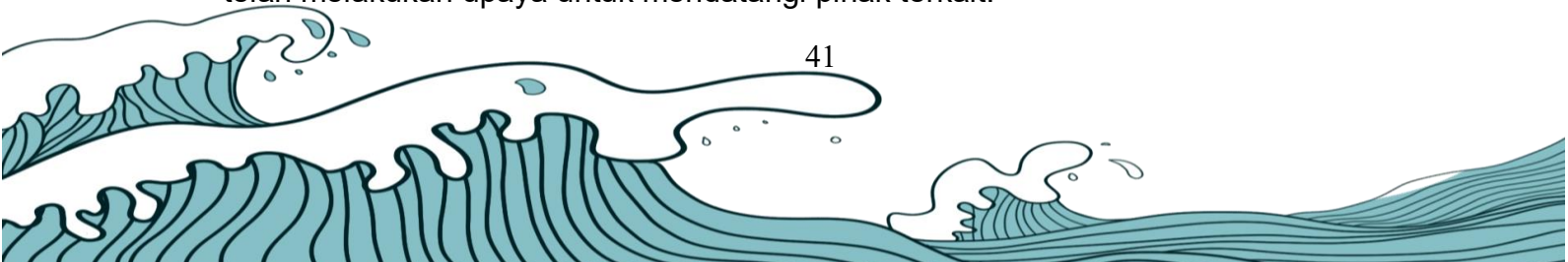
Tabel 23. Perbandingan dengan Satker Lain

Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Pekalongan	Persentase
100	100	100

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mencapai sama dengan capaian yang diperoleh PPN Pekalongan, yaitu 100%.

d. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

IKU ini dapat dilakukan apabila satker telah menindaklanjuti temuan yang telah dilakukan oleh ITJEN KKP dan melaksanakan saran yang telah diberikan. Aplikasi yang digunakan adalah Sidak KKP. Penyebab tidak tercapainya target untuk indikator ini adalah temuan pada Tahun 2021 berupa piutang tambat labuh oleh pengguna jasa (nelayan). Pengguna jasa tidak sanggup melunasi tagihan tersebut, sehingga pihak PPN Pengembangan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penagihan berupa teguran, surat pemanggilan hingga melakukan pelaporan pada pihak KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) untuk dilakukan pailit. Pihak KPKNL telah melakukan upaya untuk mendatangi pihak terkait.



e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

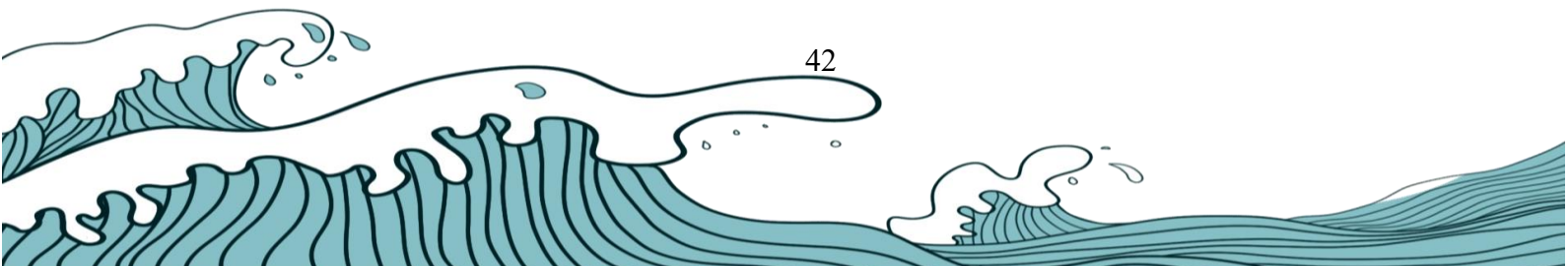
Tabel 24. Realisasi anggaran mendukung IKU

Indikator	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)		
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Pengembangan	116,28%	-	-	-	-	-	-

Pada Triwulan I Tahun 2026, belum terdapat realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan adalah penanggung jawab masing-masing kriteria pada masing-masing tim dan operator Sidak sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan ini berupa pelaksanaan pelaporan tindak lanjut terhadap temuan oleh ITJEN KKP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan. Sebagai bentuk antisipasi untuk tunggakan tambat labuh agar tidak terulang kembali, digunakan aplikasi SIJAKA untuk pengguna jasa yang akan berangkat berlayar dan digunakan Teman SPB supaya SPB dapat diterbitkan.



IKU- 14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)

Capaian IKU diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Itjen pada masing-masing unit eselon I lingkup KKP dengan parameter yang telah ditetapkan, antara lain:

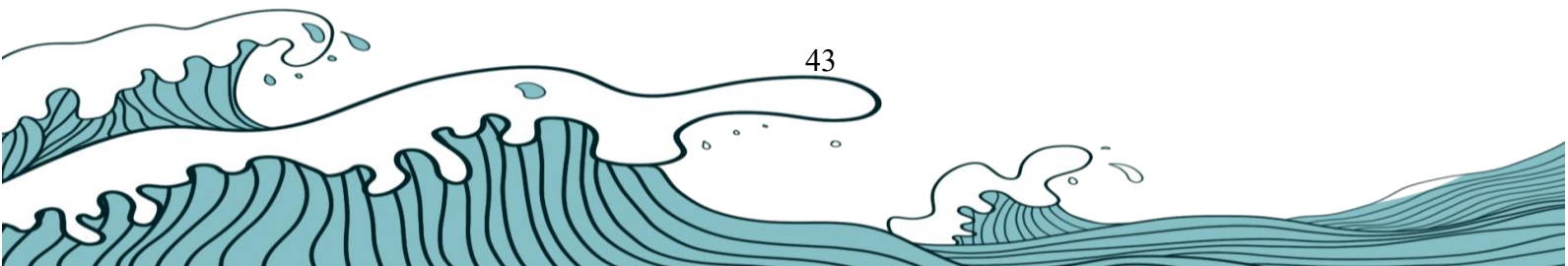
- Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa Strategis Unit Eselon I
- Perencanaan dan Persiapan Pengadaan
- Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE
- Kesesuaian Tahap Pelaksanaan
- Laporan Penyelenggaraan PBJ
- Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I

Tabel 25. Rincian Capaian Indikator

Sasaran Kegiatan – 5		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan			
Indikator Kinerja – 14		Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)			
Triwulan I Tahun 2025		Triwulan I Tahun 2026		% Capaian Terhadap	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi Tw I Tahun 2025	Target Tw I Tahun 2026
76	100	77	100	131,57	129,87

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan memiliki realisasi yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan sebesar 129,87%. Target Triwulan I Tahun 2026 yaitu 77 sedangkan realisasi sebesar 100.



b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Berdasarkan data tersebut, indikator Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen), capaian Triwulan I Tahun 2026 sama dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 yaitu mencapai lebih dari 100%.

c. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tabel 26. Perbandingan dengan Satker Lain

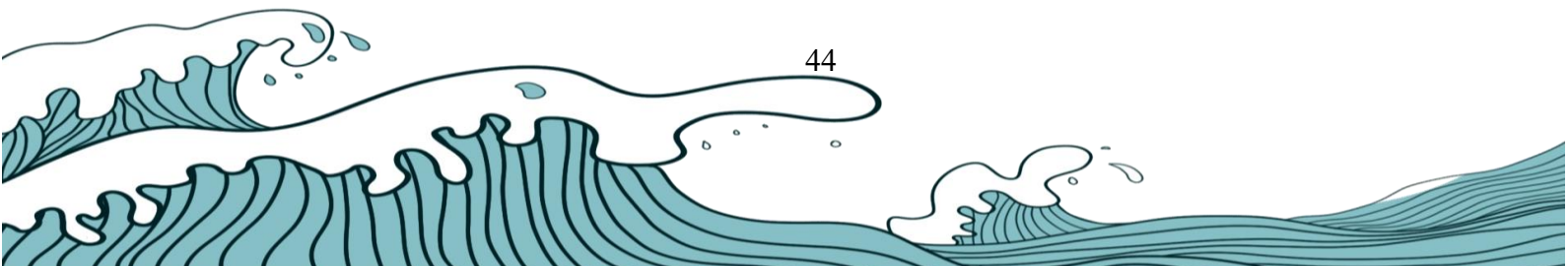
Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Pekalongan	Persentase
100	100	100

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, capaian Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sama dengan capaian Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan yaitu mencapai 100%.

d. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk peningkatan capaian IKU dimaksud pada tahun berikutnya, antara lain:

- Mengumumkan seluruh Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP);
- Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa
- Menyiapkan dokumen tender (KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak) pengadaan barang dan jasa dengan kontrak/Surat Perjanjian sejak periode akhir tahun anggaran sebelumnya (T-1) sehingga paket pengadaan barang dan jasa dapat segera dikontrakkan pada kesempatan pertama;
- Menyelesaikan kontrak/surat perjanjian PBJ tepat waktu;
- Menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan pengadaan barang/jasa



e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 27. Realisasi anggaran mendukung IKU

Indikator	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)		
Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	129,87	3.640.832.000	565.866.613	4.728.353.247	4.162.486.634	114%	336%

Pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen) adalah sebesar 565.866.613. Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 114%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan adalah Tim Kerja Dukungan Manajerial bagian pengadaan barang dan jasa sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan ini dapat ditunjang oleh penambahan SDM sebagai anggota Pokja sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja.

IKU-18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)

Indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan merupakan indikator baru yang ada di tahun 2023. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah dengan



melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan dengan mengukur tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Tabel 28. Rincian Capaian Indikator

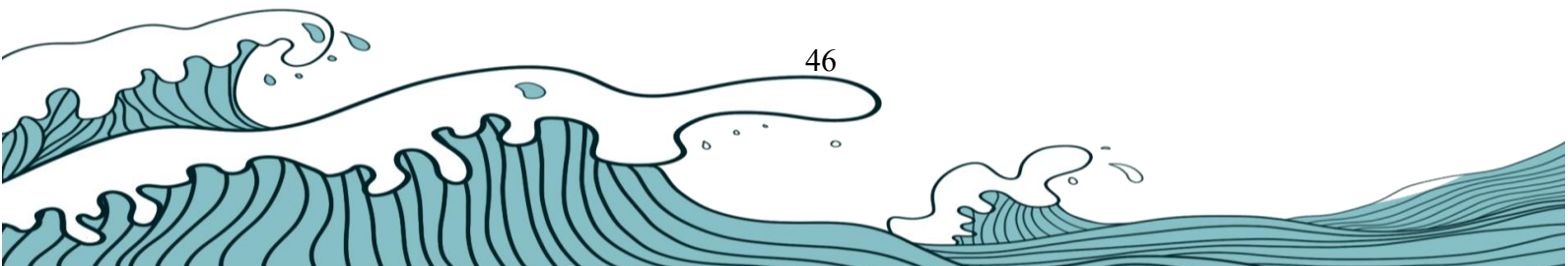
Sasaran Kegiatan – 5		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan			
Indikator Kinerja – 18		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)			
Triwulan I Tahun 2025		Triwulan I Tahun 2026		% Capaian Terhadap	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi Tw I Tahun 2025	Target Tw I Tahun 2026
88,50	94,18	88,80	90,67	106,42	102,11

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan memiliki realisasi yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan. Target Triwulan I Tahun 2026 yaitu 88,80 sedangkan realisasi sebesar 90,67 atau sebesar 102,11%.

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Berdasarkan data tersebut di atas, capaian Triwulan I Tahun 2026 secara prosentase lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 sebesar 106,42%. Hal ini dikarenakan target yang ditetapkan pada triwulan I Tahun 2026 lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan pada Triwulan I tahun 2025. Target triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 88,50, sedangkan target pada triwulan I tahun 2026 adalah 88,80. Realisasi triwulan I Tahun 2026 sebesar 90,87 sedangkan realisasi Triwulan I Tahun 2025 sebesar 94,18.



c. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tabel 29. Perbandingan dengan Satker Lain

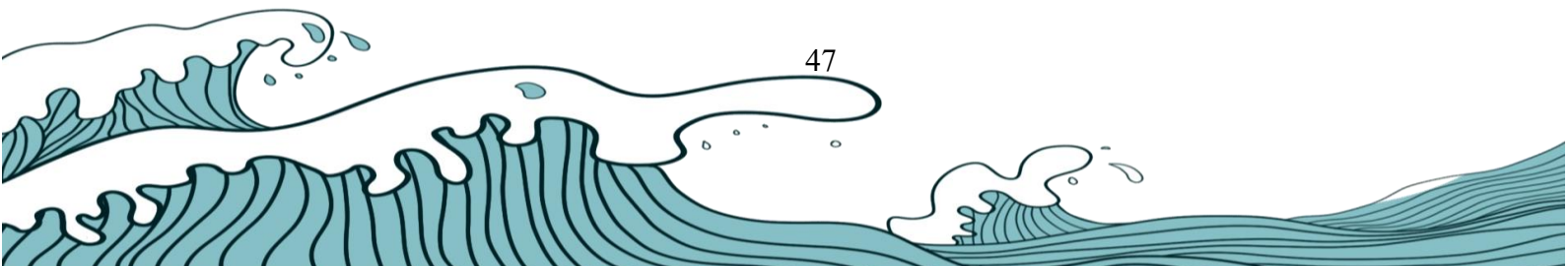
Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Pekalongan	Persentase
90,67	96,19	94,57

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mencapai 94,57%. Faktor yang mempengaruhi adalah optimalnya pelaksanaan survei yang dilakukan oleh petugas pelayanan di PPN Pengembangan dan didukung dengan pelayanan yang prima yang telah dilakukan.

d. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan terhadap unit penyelenggara pelayanan publik menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei ini dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Salah satu cara agar nilai IKM optimal yaitu dengan melakukan perbaikan pelayanan secara berkala dan mempertimbangkan masukan, saran, maupun kritik dari pengguna jasa. Sedangkan hal yang berpengaruh terhadap nilai dari hasil survey kepuasan yang rendah yaitu terkait dengan belum optimalnya pelaksanaan PTSA (Pelayanan Terpadu Satu Atap) di PPN Pengembangan, dan jumlah petugas pelayanan yang masih terbatas.



e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 30. Realisasi anggaran mendukung IKU

Indikator	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)- (4)		
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Pengembangan	102,11%	-	-	-	-	-	-

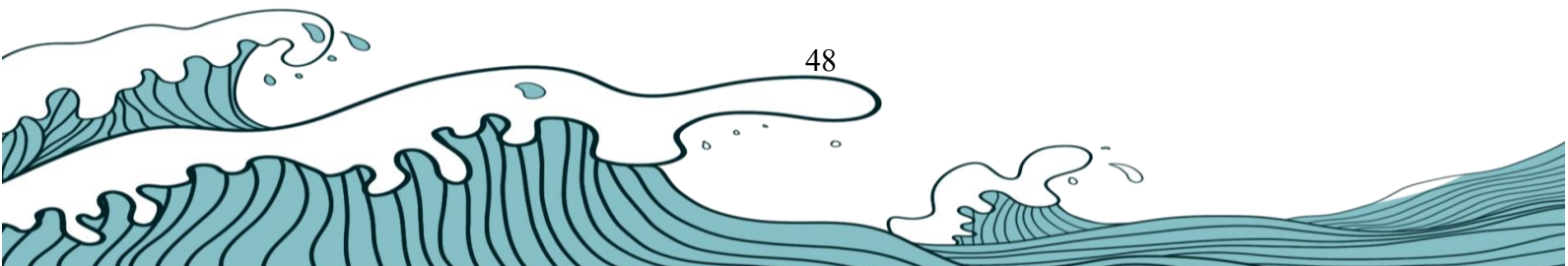
Pada Triwulan I Tahun 2026, belum terdapat realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan adalah penanggung jawab masing-masing kriteria pada masing-masing tim dan operator Si Susan sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pelayanan publik agar nilai kepuasan masyarakat tinggi yaitu dengan dilaksanakan sosialisasi kepada pengguna jasa terkait standar pelayanan. Selain itu juga terdapat monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh tim pelayanan publik. Pada monev tersebut membahas hasil SKM yang telah dilaksanakan dan melakukan pembahasan tindak lanjut terkait saran, masukan dan kritik yang telah disampaikan pengguna jasa pada saat mengisi survei. Dengan adanya evaluasi tersebut diharapkan pelayanan publik di PPN Pengembangan jauh lebih baik pada setiap periode penilaiannya.

B. Akuntabilitas Keuangan

Pada 2026 ini Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mendapatkan alokasi anggaran APBN sebesar Rp **288.330.856.000,-** yang diperoleh untuk menjalankan kegiatan yang telah disusun yakni sebagai berikut :



Tabel 31. Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Triwulan I Tahun 2026

KODE AKUN	URAIAN	PAGU	TARGET TAHUN 2026		REALISASI TW I TAHUN 2026		
			TARGET	% PAGU	REALISASI	% TARGET	% PAGU
032.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	274.869.432.000	284.244.914	0,10%	284.244.914	100%	0,10%
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	274.869.432.000	284.244.914	0,10%	284.244.914	100%	0,10%
2338.BGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi[Base Line]	404.898.000	15.973.790	3,95%	15.973.790	100%	3,95%
2338.BGA.002	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	404.898.000	15.973.790	3,95%	15.973.790	100%	3,95%
2338.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan[Base Line]	274.464.534.000	268.271.124	0,10%	268.271.124	100%	0,10%
2338.RBQ.003	Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM I	274.464.534.000	268.271.124	0,10%	268.271.124	100%	0,10%
032.03.WA	Program Dukungan Manajemen	13.461.424.000	2.879.858.825	21,39%	2.879.858.825	100%	21,39%
2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	13.461.424.000	2.879.858.825	21,39%	2.879.858.825	100%	21,39%
2342.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi[Base Line]	22.500.000	0	0,00%	0		0,00%
2342.CAN.955	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	22.500.000	0	0,00%	0		0,00%
2342.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	13.323.924.000	2.867.693.346	21,52%	2.867.693.346	100%	21,52%
2342.EBA.994	Layanan Perkantoran	13.323.924.000	2.867.693.346	21,52%	2.867.693.346	100%	21,52%
2342.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	115.000.000	12.165.479	10,58%	12.165.479	100%	10,58%
2342.EBB.951	Layanan Sarana Internal	21.500.000	4.665.479	21,70%	4.665.479	100%	21,70%
2342.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	93.500.000	7.500.000	8,02%	7.500.000	100%	8,02%

Dari pagu anggaran tersebut di atas, realisasi keuangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dalam rangka mendukung pelaksanaan program- program kegiatannya telah terealisasi sebesar Rp 1.899.841.983,- atau 0,65 % dari total anggaran.

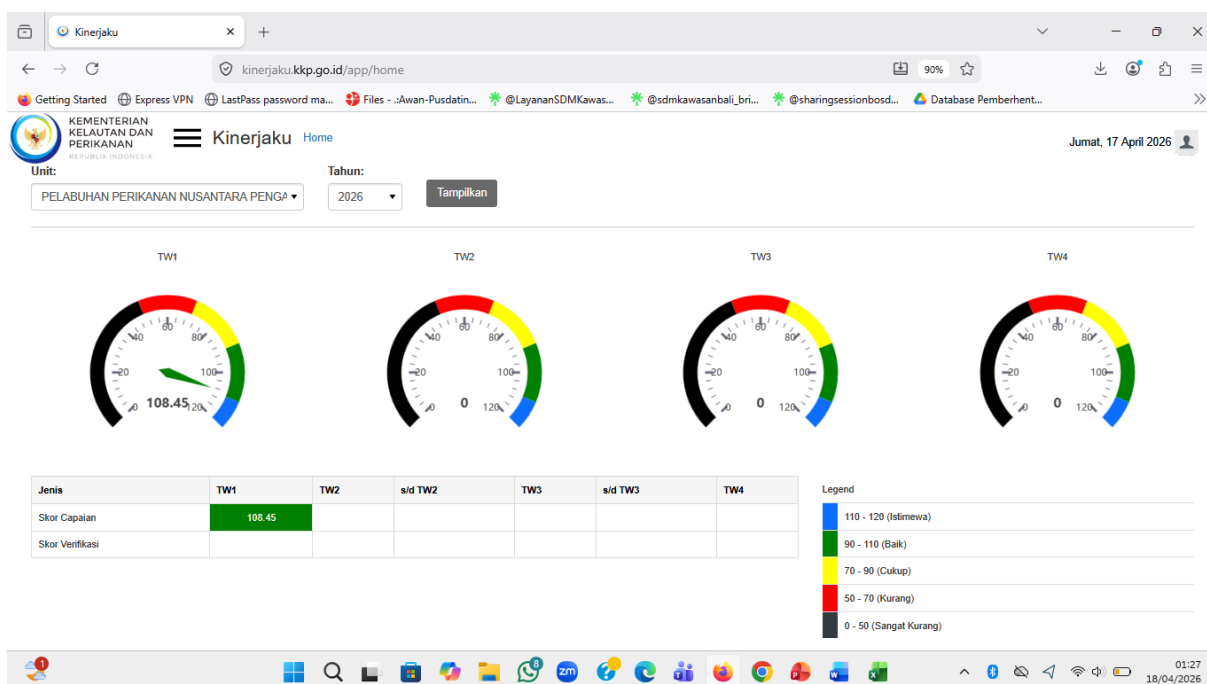
Tabel 32. Realisasi Keuangan PPN Pengembangan s/d Triwulan I Tahun 2026

KODE AKUN	URAIAN	PAGU	REALISASI TW I TAHUN 2026		
			REALISASI	% TARGET	% PAGU
032.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	274.869.432.000	284.244.914	100%	0,10%
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	274.869.432.000	284.244.914	100%	0,10%
2338.BGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi[Base Line]	404.898.000	15.973.790	100%	3,95%
2338.BGA.002	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	404.898.000	15.973.790	100%	3,95%
2338.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan[Base Line]	274.464.534.000	268.271.124	100%	0,10%
2338.RBQ.003	Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM I	274.464.534.000	268.271.124	100%	0,10%
032.03.WA	Program Dukungan Manajemen	13.461.424.000	2.879.858.825	100%	21,39%
2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	13.461.424.000	2.879.858.825	100%	21,39%
2342.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi[Base Line]	22.500.000	0		0,00%
2342.CAN.955	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	22.500.000	0		0,00%
2342.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	13.323.924.000	2.867.693.346	100%	21,52%
2342.EBA.994	Layanan Perkantoran	13.323.924.000	2.867.693.346	100%	21,52%
2342.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	115.000.000	12.165.479	100%	10,58%
2342.EBB.951	Layanan Sarana Internal	21.500.000	4.665.479	100%	21,70%
2342.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	93.500.000	7.500.000	100%	8,02%

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Triwulan I Tahun 2026 menyajikan capaian strategis organisasi yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan target sebesar Rp 288.330.856.000,- pada Tahun 2026, yang terealisasi sebesar Rp 1.899.841.983,- atau 0,65 % dari total target penyerapan anggaran pada Tahun 2026. Sedangkan secara kinerja dengan hasil capaian sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dan dapat memenuhi target dengan Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambahkan dengan Nilai Indikator Kinerja (IK) sebesar **108,45%**. (Sesuai dashboard pada Aplikasi Kinerjaku pada Gambar 1)



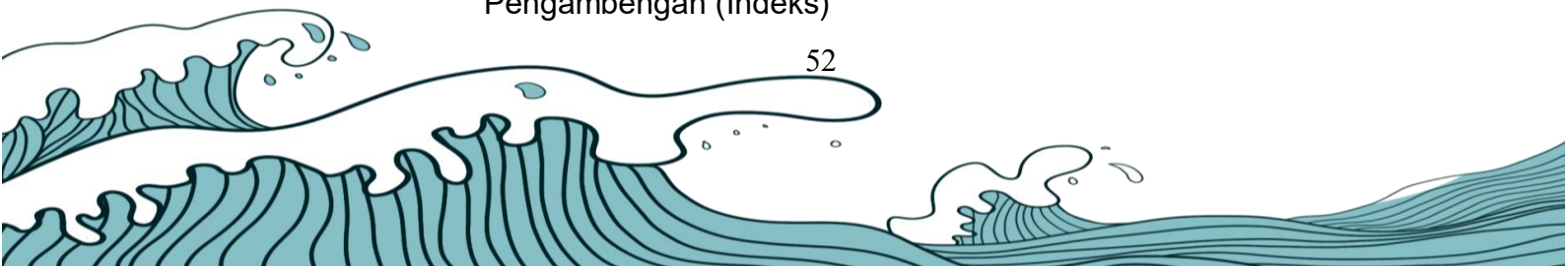
Gambar 3. Dashboard pada aplikasi Kinerjaku Pelabuhan Perikanan Nusantara

Dari hasil pengukuran kinerja Ditjen Perikanan Tangkap dan UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan s/d Triwulan I Tahun 2026 melalui pencapaian target indikator kinerja yang di input ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, diperoleh hasil indikator yang memenuhi target yaitu sebagai berikut :

1. IKS.1 Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Pengembangan (Rp Juta)
2. IKS.02.1 Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan (Ton)
3. IKS.03.2 Tingkat Kinerja PPN Pengembangan (Nilai)
4. IKS.03.5 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
5. IKS.04.1 Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)
6. IKS.05.2 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
7. IKS.05.5 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
8. IKS.05.9 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)

Sedangkan untuk indikator yang belum dilakukan pengukuran pada triwulan I Tahun 2026, antara lain :

1. IKS.03.1 Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan (Persen)
2. IKS.03.3 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
3. IKS.03.4 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
4. IKS.04.2 Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)
5. IKS.05.1 Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
6. IKS.05.3 Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
7. IKS.05.4 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)



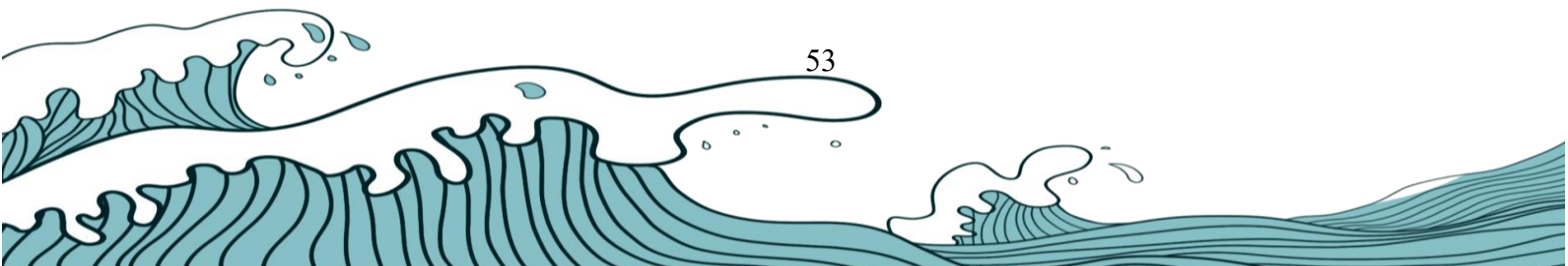
8. IKS.05.6 Persentase Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
9. IKS.05.7 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
10. IKS.05.8 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)

Dalam pelaksanaan capaian indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara pengembangan, terdapat kendala dan permasalahan, adapun permasalahan yang dialami adalah :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat nelayan akan kepemilikan Asuransi untuk perlindungan kerja dan jaminan sosial yang dapat memberikan jaminan dan perlindungan apa bila terjadi kecelakaan bagi nelayan.
2. Berkurangnya *bandwidth* internet yang mempengaruhi kinerja pelayanan dan kegiatan perkantoran karena banyak aplikasi yang berbasis internet.
3. Terdapat kerusakan pada Fasilitas gedung kantor namun belum bisa diperbaiki karena anggaran tidak mencukupi

B. Tindak Lanjut Periode Sebelumnya

1. Telah dilakukan perbaikan pada dermaga utama lingkungan PPN Pengembangan.
2. Telah dilakukan perbaikan kebocoran atap di Gedung *cold storage* di kantor PPN Pengembangan pada bulan Januari 2025
3. Peningkatan sosialisasi dan bimbingan teknis CPIB Tahun 2026 belum bisa dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan alokasi anggaran.
4. Telah diadakan sosialisasi dan himbauan kepada nelayan atau pemilik kapala sehingga sebagian besar awak kapal terutama nakhoda sudah memiliki sertifikat SKK.



C. Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil pembahasan pencapaian indikator kinerja sebagaimana pada Bab II di atas, hal – hal yang dapat disarankan untuk perbaikan pengelolaan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi dan pelayanan bersama BPJS Ketenagakerjaan di PPN Pengembangan serta tidak ada penerbitan SPB bagi kapal yang tidak memberikan jaminan dan perlindungan terhadap awak kapal
2. Penambahan bandwidth internet menjadi 50 MBps dan khusus untuk aplikasi teleconference seperti zoom di buatkan jalur tersendiri dengan penambahan langganan internet up to 200 MBps
3. Melakukan revisi penambahan anggaran pemeliharaan gedung untuk memperbaiki fasilitas gedung yg rusak

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Triwulan I Tahun 2026 ini disampaikan sebagai tolak ukur kinerja pelabuhan dan bahan kajian evaluasi serta koreksi dalam rangka pembangunan dan pengembangan unit kerja di masa yang akan datang.

